



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan pemerataan akses layanan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen perlu mengalokasikan dan menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah;
 - b. bahwa untuk mendukung pengelolaan dana bantuan operasional sekolah yang transparan, akuntabel, tepat sasaran dan tepat guna;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793)

6. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 342);
7. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 886);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 67 Tahun 2015 tentang Bantuan Pemerintah pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1131);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1342) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1045);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16/P/2021 tentang Satuan Biaya Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler Masing-masing Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN.**

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan besaran bantuan dana BOS sesuai wilayah (Provinsi/kabupaten/kota), sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan/pedoman bagi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam memberikan bantuan operasional sekolah kepada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen Tingkat Dasar dan Tingkat Menengah.
- KEEMPAT : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2025

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



Jeane Marie Tulung

JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL
SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan terencana terutama dalam mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang efektif dan efisien sehingga peserta didik dalam hal ini anak-anak khususnya dapat secara aktif mengembangkan potensi dirinya yang nantinya diharapkan dapat mewujudkan dalam dirinya kekuatan spiritual keagamaan yang tinggi, kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia serta keterampilan yang akan berguna baik bagi dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, pemberian ijin pendirian, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan terhadap SDK, SMPTK, SMAK, SMTK, atau bentuk lain yang sejenis dilakukan oleh Menteri Agama Republik Indonesia cq Dirjen Bimas Kristen sesuai tugas dan fungsi Ditjen Bimas Kristen.

Oleh karena itu untuk tercapainya tujuan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun sebagaimana disebut di atas pada jenis pendidikan keagamaan Kristen, pemerintah dalam hal ini Ditjen Bimas Kristen memberikan dukungan dalam bentuk bantuan antara lain Bantuan Operasional sekolah (BOS) yang diperuntukkan untuk Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDK), Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen (SMPTK), Sekolah Menengah Teologi Kristen (SMTK) dan Sekolah Menengah Agama Kristen (SMAK) di Indonesia.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dimulai sejak bulan Juli 2005, sangat signifikan dalam menyukseskan program wajib belajar 12 tahun. Sejak tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahan tujuan, pendekatan dan orientasi program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yaitu dari perluasan akses menuju peningkatan kualitas yang diikuti peningkatan biaya satuan, perubahan mekanisme penyaluran kepada lembaga pendidikan penerima termasuk lembaga pendidikan keagamaan Kristen yang dikelola oleh masyarakat dan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Kristen. Hal ini untuk mewujudkan pendidikan formal keagamaan Kristen sebagai pusat pengembangan mutu pendidikan dan implementasi tema pelayanan pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah yaitu "menjangkau siswa di daerah terpencil yang susah di jangkau (*reaching the unreach*).

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama melakukan reorientasi program Bantuan Operasional Sekolah Pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen (SPKK) yang tidak hanya memfokuskan pada tujuan aksesibilitas, melainkan juga memfokuskan pada peningkatan mutu pembelajaran. Dalam konteks ini, Bantuan Operasional Operasional

Sekolah Pada (SPKK) diharapkan dapat menjadi salah satu instrumen efektif untuk peningkatan mutu pembelajaran siswa. Dalam rangka optimalisasi dan efektivitas penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah pada SPKK, maka disusun Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah ini.

B. Pengertian

1. Pendidikan Keagamaan Kristen adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Kristen dan/atau menjadi ahli ilmu agama Kristen dan mengamalkan ajaran agama Kristen.
2. Pendidikan Keagamaan Kristen Formal adalah pendidikan keagamaan Kristen yang diselenggarakan di lembaga pendidikan secara terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar dan menengah.
3. Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen selanjutnya disingkat SPKK adalah satuan pendidikan keagamaan formal tingkat dasar dan menengah dalam binaan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan dengan memadukan ilmu agama Kristen dan ilmu pengetahuan umum
4. Sekolah Dasar Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SDTK adalah satuan pendidikan formal Keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Dasar/SD dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen.
5. Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SMPTK adalah satuan pendidikan formal Keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Menengah Pertama/SMP dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen
6. Sekolah Menengah Teologi Kristen yang selanjutnya disebut SMTK adalah satuan pendidikan formal Keagamaan Kristen setara dengan Sekolah Menengah Atas/SMA/SMK dan/atau yang sederajat yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan umum dengan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen.
7. Sekolah Menengah Agama Kristen yang selanjutnya disebut SMAK adalah satuan pendidikan formal setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengintegrasikan mata pelajaran pendidikan keagamaan Kristen dan mata pelajaran umum.
8. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasional non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
9. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah dana alokasi khusus nonfisik yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar.
10. Daerah Khusus adalah Daerah terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan

dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain.

11. Nomor Induk Siswa Nasional yang selanjutnya disebut NISN adalah kode pengenal siswa yang bersifat unik dan membedakan satu siswa dengan siswa lain yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Rekening Sekolah adalah rekening yang digunakan sekolah untuk menerima dana BOS.
13. Peserta Didik adalah masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
15. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

C. Tujuan

Tujuan pemberian Bantuan Operasional Sekolah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen adalah:

- a. Tujuan secara umum program BOS adalah untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang bermutu, serta berperan dalam mempercepat pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada sekolah-sekolah yang belum memenuhi SPM, dan pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada sekolah-sekolah yang sudah memenuhi SPM.
- b. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:
 - 1) Membebaskan pungutan bagi seluruh peserta didik yang bersekolah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen terhadap biaya operasional sekolah;
 - 2) Meringankan beban biaya operasional sekolah yang dibebankan pada peserta didik yang bersekolah pada Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen

D. Besaran Bantuan

Besaran dana BOS yang diterima oleh sekolah dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dan besarnya dibedakan berdasarkan indeks kemahalan daerah dan per jenjang sekolah sebagaimana tercantum pada lampiran II pada petunjuk teknis ini

E. Sasaran

Sasaran program BOS adalah semua Satuan Pendidikan Keagamaan Kristen di Indonesia yang memiliki Ijin Penyelenggaraan dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

F. Prinsip Pengelolaan Dana BOS

Pengelolaan Dana BOS dilakukan berdasarkan prinsip:

1. Fleksibel yaitu pengelolaan dana dilakukan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan berdasarkan komponen penggunaan dana;
2. Efektif yaitu pengelolaan dana diupayakan dapat memberikan hasil, pengaruh, dan daya guna untuk mencapai tujuan pendidikan di Satuan Pendidikan;
3. Efisien yaitu pengelolaan dana diupayakan untuk meningkatkan kualitas belajar Peserta Didik dengan biaya seminimal mungkin dengan hasil yang optimal;
4. Akuntabel yaitu pengelolaan dana dapat dipertanggungjawabkan secara keseluruhan berdasarkan pertimbangan yang logis sesuai peraturan perundang undangan; dan
5. Transparan yaitu pengelolaan dana dikelola secara terbuka dan mengakomodir aspirasi pemangku kepentingan sesuai dengan kebutuhan Satuan Pendidikan

G. Waktu Penyaluran Dana BOS

Penyaluran dana BOS dapat dilakukan dengan dua tahap, yakni pada semester berjalan.

1. Semester ganjil pada kurun waktu Juli s/d Desember;
2. Semester genap pada kurun waktu Januari s/d Juni.

Penyaluran Dana BOS ini tidak terikat pada bulan tertentu dan dapat dilakukan pada bulan mana saja dalam semester berjalan.

BAB II IMPLEMENTASI DANA BOS

A. Ketentuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS

Ketentuan bagi sekolah penerima Bantuan Operasional Sekolah adalah Sebagai Berikut :

1. Semua SPKK yang telah memiliki ljin Penyelenggaraan dari Direktorat Jenderal Bimas Kristen berhak menerima dana BOS kecuali SPKK yang menolak dan menyatakan tidak bersedia menerima dana BOS dinyatakan secara tertulis;
2. SPKK yang telah melakukan pemutakhiran data pendidikan pada EMIS;
3. SPKK dapat memungut biaya pendidikan yang digunakan untuk memenuhi kekurangan biaya operasional;
4. SPKK dapat menerima sumbangan dari masyarakat dan orang tua/wali peserta didik yang mampu untuk memenuhi kekurangan biaya yang diperlukan oleh sekolah. Sumbangan dapat berupa uang dan/atau barang/jasa yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan jumlah maupun jangka waktu pemberiannya;
5. Pemerintah harus ikut mengendalikan dan mengawasi sumbangan yang diterima dari masyarakat/orang tua/wali peserta didik tersebut dengan mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas;
6. Pemerintah dapat membatalkan pungutan yang dilakukan oleh sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.

B. Program BOS dan Program Wajib Belajar 12 Tahun

Melalui program BOS yang terkait pendidikan dasar 12 tahun, setiap pengelola program pendidikan harus memperhatikan hal-hal berikut :

1. BOS harus menjadi sarana penting untuk meningkatkan akses pendidikan dasar 12 tahun yang bermutu;
2. BOS harus menjamin kepastian lulusan SDTK dapat melanjutkan ke tingkat SMPTK/SMP, dan lulusan SMPTK dapat melanjutkan ke tingkat SMTK/SMAK/SMA;
3. Kepala sekolah berkewajiban mengidentifikasikan anak putus sekolah di lingkungannya untuk diajak kembali ke bangku sekolah;
4. Kepala sekolah harus mengelola dana BOS secara transparan dan akuntabel;

C. Program BOS dan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Program ini memberikan dukungan kepada sekolah dalam menetapkan konsep MBS. Dana BOS diterima sekolah secara utuh dan dikelola secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan dewan guru dan komite sekolah sebagai dukungan kepada sekolah untuk menerapkan konsep MBS yaitu:

1. Kebebasan dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing sekolah. Penggunaan dana semata-mata ditujukan untuk kepentingan peningkatan layanan pendidikan dan tidak ada intervensi atau pemotongan dana dari pihak manapun dan untuk kepentingan apapun. Pengelolaan program BOS menjadi kewenangan sekolah secara mandiri, professional, transparan, dan akuntabel, dengan menerapkan prinsip efisien, efektif dan tepat guna;
2. Sekolah melakukan evaluasi diri sekolah secara rutin;
3. Sekolah harus memiliki Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) 4 Tahunan;
4. Sekolah harus menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam bentuk Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan dana BOS merupakan bagian integral dari RKAS tersebut;
5. Rencana Jangka Menengah dan RKAS harus didasarkan hasil evaluasi evaluasi diri sekolah;
6. Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Rencana Kegiatan dan anggaran Sekolah (RKAS) harus dibahas dan disetujui dalam rapat dewan guru/pendididk, disetujui /ditandatangani kepala sekolah setelah memperhatikan pertimbangan Komite Sekolah dan ditandatangani oleh Yayasan;
7. Rencana Penggunaan Dana/Rencana Anggaran Biaya (RAB) BOS harus disetujui/ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Yayasan.

STRUKTUR ORGANISASI PENGELOLA BOS

Organisasi Pengelola BOS pada SPKK di lingkungan Ditjen Bimas Kristen terdiri dari Tim Pengelola BOS Pusat, Tim Pengelola BOS Provinsi, Tim Pengelola BOS Daerah Kab/Kota, dan Pengelola BOS pada SPKK.

A. Tim Pengelola BOS Pusat

Berkedudukan di Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal

Pengarah : Direktur Jenderal Bimas Kristen
Penanggungjawab : Direktur Pendidikan Kristen
Anggota : Kasubdit Pendidikan Dasar
Kasubdit Pendidikan Menengah
Perencana Ahli Madya
Kasubbag TU Direktorat Pendidikan Kristen
Kelompok Jabatan Fungsional/Pelaksana
pada Subdirektorat Pendidikan Dasar dan
Menengah

Tugas dan tanggung jawab :

- 1 Menetapkan Petunjuk Teknis Pengelolaan BOS;
- 2 Menetapkan alokasi dana BOS untuk masing-masing provinsi;
- 3 Menyalurkan dana BOS pada SPKK;
- 4 Merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kualitas belanja BOS;
- 5 Melaksanakan bimbingan teknis pengelolaan dan penggunaan dana BOS;
- 6 Memberikan pelayanan konsultasi teknis dan penanganan pengaduan masyarakat

Larangan :

1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
2. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;
3. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

B. Tim Pengelola BOS Kanwil

Berkedudukan di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi

Pengarah : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Penanggungjawab : Kepala Bidang Pendidikan Kristen
Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Kristen
Pembimas Kristen
Anggota : Kasi Pendidikan Kristen/JF yang disetarakan
JF/Pelaksana pada Kanwil Kemenag Provinsi
Operator Data
Perencana Anggaran

Tugas dan tanggung jawab:

1. Membantu melakukan verifikasi dan validasi kebenaran alokasi dana setiap SPKK di tingkat Provinsi;
2. Melakukan sosialisasi program BOS di tingkat provinsi;
3. Melakukan pendampingan kepada Tim BOS Kabupaten/Kota;
4. Merencanakan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian kualitas belanja BOS di tingkat provinsi;
5. Membuat rekapitulasi dana BOS yang disalurkan ke sekolah;

6. Membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
7. Melihat kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara yang diusulkan dalam EDM dan yang direncanakan dalam RKAS (bagi SPKK swasta) dan RKA - KL, DIPA dan POK (bagi SPKK negeri). Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, provinsi dapat memintakan justifikasi, memberi masukan dan/atau menolak RKAS, RKA-KL yang disusun oleh Sekolah.

Larangan :

1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
2. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;
3. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

C. Tim Pengelola BOS Kabupaten/Kota

Berkedudukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

Pengarah : Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten /Kota.

Penanggungjawab : Kasi Pendidikan Kristen
Kasi Bimas Kristen

Anggota : JF/Pelaksana pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
Operator Data
Perencana Anggaran

Tugas dan tanggung jawab

1. Membantu melakukan verifikasi dan validasi kebenaran data siswa dan alokasi dana pada tiap SPKK Penerima Dana di dalam Kabupaten/Kota-nya;
2. Melakukan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan program dengan SPKK dalam rangka penyaluran dana BOS;
3. Melakukan sosialisasi program BOS di tingkat Kabupaten/Kota;
4. Membantu melakukan pendampingan kepada Tim BOS SPKK;
5. melakukan pencairan dan penyaluran dana BOS tepat waktu, sesuai jumlah peserta didik dan rencana penggunaan di tiap-tiap sekolah;
6. Menyalurkan dana BOS dari Kas Negara ke rekening sekolah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan;
7. Membuat laporan penyaluran dana BOS dari bank penyalur ke sekolah;
8. Membuat Rekapitulasi nama sekolah dan nomor rekening sekolah penerima dana BOS sesuai formulir (Format IX);
9. menghimpun dan meneliti laporan penggunaan dana BOS;
10. Merencanakan dan melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian kualitas belanja BOS di tingkat kabupaten/kota;
11. Membantu memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
12. Memberikan masukan kepada tim provinsi dalam hal telaah atas kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan antara yang diusulkan dan yang direncanakan dalam RKAS (bagi SPKK swasta) dan RKA - KL, DIPA dan POK (bagi SPKK negeri), bagi SPKK yang ada di wilayahnya

Larangan :

Larangan :

1. Melakukan pungutan dalam bentuk apapun;
2. melakukan pemaksaan dalam pembelian barang dan jasa dalam pemanfaatan dana BOS;
3. bertindak menjadi distributor/pengecer dalam proses pembelian/pengadaan buku/barang.

D. Tim Pengelola BOS pada SPKK

Berkedudukan di SPKK dan ditetapkan oleh Kepala SPKK

Penanggungjawab : Kepala Sekolah

Anggota : Bendahara Sekolah

Satu orang dari unsur guru

Satu orang dari unsur Komite Sekolah

Tugas dan tanggung jawab:

1. Menyusun RKAS bagi SPKK Swasta dan menyusun RKA-KL bagi SPKK Negeri;
2. Bersama Komite mengidentifikasi siswa miskin yang akan dibebaskan dari segala jenis iuran;
3. Menyiapkan dan melakukan verifikasi data siswa pada sekolah;
4. membuat secara tertulis data siswa masing-masing sekolah dan menyampaikan kepada Ditjen Bimas Kristen/Kabid/Pembimas di Provinsi/kankemenag Kabupaten/kota;
5. Mengelola dana BOS secara bertanggung jawab, transparan dan akuntabel;
6. Membuat dan mengumumkan rencana penggunaan dana BOS di SPKK menurut komponen dan besar dananya sesuai formulir (Format VII) rencana penggunaan BOS periode s/d
 - Jumlah peserta didiksiswa
 - Komponen/jenis penggunaan dana BOS
 - Jumlah Dana BOS : Rp.....
7. Mengumumkan besaran dana BOS yang digunakan oleh SPKK yang ditandatangani oleh Kepala SPKK, Bendahara, dan Komite Sekolah;
8. Membuat laporan pertanggungjawaban dana BOS secara periodik yang ditandatangani oleh Kepala SPKK;
9. Bertanggung jawab terhadap penyimpangan penggunaan dana di SPKK;
10. Memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat;
11. Menyimpan bukti-bukti pengeluaran asli dengan baik dan diarsipkan dengan rapi;
12. Mengelola dana BOS secara transparan dan bertanggungjawab;

BAB IV

PROSEDUR PELAKSANAAN BOS

A. Proses Pendataan

Pendataan peserta didik pada SDTK, SMPTK, SMTK, dan SMAK merupakan langkah awal dan penting untuk proses pengalokasian dan penyaluran dana BOS. Untuk menjamin data akurat dan terkini, maka Kepala SPKK mengikuti ketentuan sebagai berikut :

1. Membuat Surat Perjanjian Kerjasama (Format I);
2. Mengisi Formulir 1 untuk Formulir peserta didik (Format II);
3. Mengisi Formulir 2 untuk Formulir Sekolah (Format III);
4. Membuat dan menandatangani Pakta Integritas (Format IV);

5. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak (Format V);
 6. Membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (Format VI);
- B. Proses Penetapan Alokasi Dana BOS
- Penetapan, pencairan dan penyaluran jumlah dana BOS di tiap-tiap SPKK dihitung berdasarkan jumlah peserta didik dan besarnya dibedakan berdasarkan indeks kemahalan daerah dan per jenjang sekolah.
- C. Penyaluran Dana BOS
- Dana BOS disalurkan ke rekening atas nama sekolah (bukan atas nama pribadi) dengan dua tahap dalam semester berjalan yakni pada Semester genap (Januari s/d Juni) dan Semester ganjil (Juli s/d Desember) melalui mekanisme pembayaran langsung. Penyaluran Dana BOS ini dapat dilakukan pada bulan mana saja dalam semester berjalan.

BAB V

PEMANFAATAN DANA BOS DAN MEKANISME BELANJA SEKOLAH

A. Pemanfaatan Dana BOS

Pemanfaatan dana BOS harus didasarkan pada skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan atau standar nasional pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dapat membantu memenuhi kebutuhan biaya operasional sekolah antara lain, meliputi:

1. Penerimaan Peserta Didik baru meliputi pembiayaan untuk:
 - a. penggandaan formulir dan publikasi atau pengumuman penerimaan Peserta Didik baru, dan biaya layanan penerimaan Peserta Didik baru dalam jaringan;
 - b. biaya kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
 - c. penentuan peminatan bagi sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan tes bakat skolastik atau tes potensi akademik bagi sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - d. pendataan ulang bagi Peserta Didik lama; dan/atau
 - e. kegiatan lainnya dalam rangka pelaksanaan penerimaan Peserta Didik baru yang relevan.
2. Pengembangan perpustakaan digunakan meliputi pembiayaan untuk:
 - a. penyediaan buku teks utama termasuk buku digital dengan ketentuan:
 - 1) buku yang dibeli merupakan buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
 - 2) memenuhi rasio 1 (satu) buku untuk setiap Peserta
 - 3) Didik pada setiap tema/mata pelajaran;
 - 4) memenuhi kebutuhan buku untuk guru pada setiap tema/mata pelajaran yang diajarkan; dan
 - 5) buku yang dibeli oleh sekolah harus dijadikan pegangan dalam proses pembelajaran di sekolah.
 - b. penyediaan buku teks pendamping termasuk buku digital yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian;
 - c. penyediaan buku non teks termasuk buku digital dengan ketentuan:
 - 1) sekolah dapat membeli atau menyediakan buku untuk mendukung proses pembelajaran di sekolah, diutamakan untuk menunjang penguatan pendidikan karakter dan pengembangan literasi sekolah; dan

- 2) buku yang dibeli sekolah adalah buku yang telah dinilai dan ditetapkan oleh Kementerian atau Pemerintah Daerah;
 - d. penyediaan atau pencetakan modul dan perangkat ajar; dan/ atau
 - e. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pengembangan perpustakaan.
3. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler meliputi pembiayaan untuk:
 - a. kegiatan pembelajaran meliputi:
 - 1) penyediaan alat pendidikan dan/atau bahan pendukung pembelajaran;
 - 2) pembelajaran remedial, pembelajaran pengayaan, dan persiapan ujian;
 - 3) biaya untuk mengembangkan media pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - 4) penyediaan aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan dalam proses pembelajaran;
 - 5) pengembangan kegiatan literasi;
 - 6) pelaksanaan pendidikan karakter dan penumbuhan budi pekerti, termasuk pencegahan dan penanganan intoleransi dan kekerasan di lingkungan Satuan Pendidikan;
 - 7) pengembangan pembelajaran berbasis proyek; dan/atau
 - 8) kegiatan pembelajaran lain yang relevan dalam rangka menunjang proses pembelajaran.
 - b. kegiatan ekstrakurikuler pembelajaran meliputi:
 - 1) penyelenggaraan ekstrakurikuler yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, termasuk pembiayaan lomba di sekolah;
 - 2) pembiayaan dalam rangka mengikuti kegiatan/lomba di dalam negeri; dan/atau
 - 3) pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang operasional kegiatan ekstrakurikuler.
4. Pelaksanaan kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran meliputi pembiayaan untuk:
 - a. penyelenggaraan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, asesmen nasional, survei karakter, asesmen sekolah, asesmen berbasis komputer dan/atau asesmen lainnya termasuk penyediaan laporan hasil ulangan/ujian/asesmen; dan/atau
 - b. pembiayaan lain yang relevan untuk kegiatan asesmen dan evaluasi pembelajaran di sekolah.
5. Pelaksanaan administrasi kegiatan sekolah meliputi pembiayaan untuk:
 - a. pengelolaan dan operasional rutin sekolah baik dalam rangka pembelajaran tatap muka dan/atau pembelajaran jarak jauh;
 - b. pembelian cairan atau sabun pembersih tangan, pembasmi kuman (*disinfectant*), masker atau penunjang kebersihan lainnya; dan/atau
 - c. pembiayaan lainnya yang relevan dalam rangka pemenuhan administrasi kegiatan sekolah.
6. Pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan meliputi pembiayaan untuk:
 - a. pengembangan/peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. pengembangan inovasi terkait konten pembelajaran dan metode pembelajaran;
 - c. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang pengembangan profesi guru dan tenaga kependidikan.

7. Pembiayaan langganan daya dan jasa meliputi pembiayaan untuk:
 - a. menyewa atau membeli genset atau panel surya, termasuk peralatan pendukungnya sesuai dengan kebutuhan, biaya perawatan dan/atau perbaikan bagi sekolah yang belum ada jaringan listrik atau kondisi listrik tidak stabil;
 - b. pembiayaan langganan daya dan jasa dapat digunakan untuk pembelian pulsa, paket data, dan/atau layanan pendidikan daring berbayar bagi pendidik dan/atau Peserta Didik dalam rangka pelaksanaan pembelajaran jarak jauh; dan/atau
 - c. pembiayaan dalam rangka pembayaran daya dan/atau jasa yang mendukung operasional sekolah meliputi, pemasangan baru, penambahan kapasitas, pembayaran langganan rutin listrik, air, telepon, internet, atau pembiayaan langganan daya dan jasa lain yang relevan.
8. Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah yang meliputi pembiayaan untuk:
 - a. perbaikan kerusakan ringan komponen non struktural bangunan sekolah seperti:
 - 1) penutup atap;
 - 2) penutup *plafond*;
 - 3) kelistrikan;
 - 4) pintu, jendela dan aksesoris lainnya;
 - 5) pengecatan; dan/atau
 - 6) penutup lantai;
 - b. perbaikan meubelair, dan/atau pembelian meja dan/atau kursi Peserta Didik atau guru jika meja dan atau kursi yang ada sudah tidak berfungsi dan/atau jumlahnya kurang mencukupi kebutuhan;
 - c. perbaikan toilet sekolah, tempat cuci tangan, saluran air kotor dan sanitasi lainnya;
 - d. penyediaan sumber air bersih termasuk pompa dan instalasinya bagi sekolah yang belum memiliki air bersih;
 - e. pemeliharaan dan/atau perbaikan komputer, printer, laptop, proyektor, dan/atau pendingin ruangan;
 - f. pemeliharaan dan/atau perbaikan peralatan praktikum;
 - g. pemeliharaan taman dan fasilitas sekolah lainnya;
 - h. penyediaan dan perawatan fasilitas/aksesibilitas bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan berkebutuhan khusus/disabilitas; dan/atau
 - i. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah.
9. Pembayaran honorarium digunakan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah alokasi Dana BOS Reguler yang diterima oleh sekolah;
 - a. bagi tenaga pendidik
 - 1) berstatus bukan aparatur sipil negara;
 - 2) tercatat pada EMIS;
 - 3) memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK); dan
 - 4) belum mendapatkan tunjangan profesi guru.
 - b. bagi tenaga kependidikan
 - 1) berstatus bukan aparatur sipil negara; dan
 - 2) ditugaskan oleh kepala sekolah yang dibuktikan dengan surat penugasan atau surat keputusan.

10. Penyediaan alat multimedia pembelajaran meliputi pembiayaan untuk pembelian dan/atau perbaikan:
 - a. komputer *desktop/work station* berupa *Personal Computer (PC)/All in One Computer* untuk digunakan dalam proses pembelajaran;
 - b. *printer* atau *printer plus scanner*;
 - c. laptop;
 - d. *Liquid Crystal Display (LCD)* proyektor; dan/atau
 - e. alat multimedia pembelajaran lainnya dalam rangka menunjang pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
11. Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kompetensi keahlian meliputi pembiayaan untuk:
 - a. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi keahlian, sertifikasi kejuruan pada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan pada SPKK;
 - b. penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional yang diperuntukkan bagi kelas akhir SMAK dan SMTK. Penyelenggaraan kegiatan uji kompetensi kemampuan bahasa asing yang berstandar internasional hanya dapat dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk secara resmi;
 - c. penyelenggaraan praktik kerja industri atau lapangan bagi Peserta Didik SMAK dan SMTK, termasuk perjalanan dinas pembimbing mencari tempat praktek, bimbingan, atau pemantauan Peserta Didik praktek;
 - d. kegiatan pemagangan guru dan/atau Peserta Didik di industri untuk masing-masing kompetensi keahlian yang dilaksanakan dalam bentuk:
 - 1) pelatihan kerja di industri;
 - 2) magang di industri untuk menghasilkan uji mutu produk atau jasa dalam merealisasi kesepakatan *teaching factory*;
 - 3) magang di industri untuk menghasilkan bahan baku *teaching factory*;
 - 4) mengikuti magang di industri dengan tujuan untuk kerjasama dalam rangka memperoleh lisensi;
 - 5) mengikuti pelatihan mendapatkan sertifikasi dari industri atau lembaga sertifikasi; dan/atau
 - 6) mengikuti magang kerja untuk menjalin kerja sama dengan industri;
 - f. penyelenggaraan SMAK dan SMTK sebagai lembaga sertifikasi profesi pihak pertama termasuk pendirian dan pengembangan ruang lingkup skema sertifikasi;
 - g. pengembangan kerja sama industri dalam rangka peningkatan kompetensi keahlian di SMAK dan SMTK; dan/atau
 - h. biaya lain yang relevan dalam peningkatan kompetensi keahlian.
12. Penyelenggaraan kegiatan dalam mendukung keterserapan lulusan SMAK dan SMTK meliputi pembiayaan untuk:
 - a. penyelenggaraan bursa kerja khusus SMAK dan SMTK termasuk perjalanan dinas pengelola bursa kerja khusus SMAK atau SMTK untuk pengembangan kerjasama,
 - b. verifikasi, pendampingan ke industri, dan/atau evaluasi;
 - c. pemantauan kebecerjaan lulusan (*tracer study*) SMAK atau SMTK termasuk perjalanan dinas; dan/atau
 - d. pembiayaan lain yang relevan dalam rangka menunjang penyelenggaraan kegiatan yang dapat mendukung keterserapan lulusan.

13. Pembiayaan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- B. Penanggungjawab pengelolaan dan penggunaan dana BOS adalah kepala SPKK penerima dana BOS.
- C. Penggunaan dana BOS di sekolah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- 1) Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah untuk kegiatan operasional sekolah;
 - 2) Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan dipergunakan untuk keperluan sekolah (berdasarkan Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor S.5965/PB/2010 Tanggal 10 Agustus 2010 perihal Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari dana BOS di rekening Sekolah).
- D. Larangan Penggunaan Dana BOS
- Dana BOS yang diterima oleh sekolah tidak boleh digunakan untuk hal-hal berikut:
- 1) Disimpan dengan maksud dibungakan;
 - 2) Dipinjamkan kepada pihak lain;
 - 3) Membeli software/perangkat lunak untuk pelaporan keuangan BOS atau software sejenis;
 - 4) membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour (Karyawisata) sejenisnya;
 - 5) Membayar iuran kegiatan yang diselenggarakan oleh instansi terkait, kecuali untuk menanggung biaya peserta didik/guru yang ikut serta dalam kegiatan tersebut;
 - 6) Membayar bonus transportasi rutin untuk guru;
 - 7) Membeli pakaian/seragam/sepatu bagi guru/peserta didik untuk kepentingan pribadi (bukan inventaris sekolah) kecuali bagi peserta didik miskin;
 - 8) Digunakan untuk rehab sedang dan berat;
 - 9) Membangun gedung/ ruangan baru;
 - 10) Membeli lembar kerja peserta didik (LKS) dan bahan/peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran;
 - 11) Memanfaatkan dana BOS ke dalam instrumen investasi bentuk apapun;
 - 12) Membiayai kegiatan penunjang yang tidak ada kaitannya dengan operasional sekolah, misalnya membiayai iuran dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan/ acara keagamaan;
 - 13) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/ sosialisasi/pendampingan terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga di luar Dinas Pendidikan Provinsi/kabupaten/kota, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama.
- E. Mekanisme Pembelian Barang /Jasa di Sekolah.
- Pembelian barang/jasa dilakukan oleh sekolah untuk keperluan operasional sekolah sesuai skala prioritas pengelolaan/pengembangan sekolah dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Menggunakan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang/jasa dan tempat pembeliannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan cara membandingkan harga

- penawaran dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dan melakukan negosiasi;
- 2) Memperhatikan kualitas barang/jasa ketersediaan dan kewajaran harga;
 - 3) Membuat laporan singkat secara tertulis tentang proses dan penetapan penyedia barang/jasa;
 - 4) Diketahui Komite Sekolah;
 - 5) Membuat rencana kerja;
 - 6) Memilih satu atau lebih pekerja untuk melaksanakan pekerjaan dengan standar upah yang berlaku di masyarakat.

F. Pencatatan Barang Inventaris

Setiap barang inventaris sekolah yang telah dibeli, sekolah wajib dilakukan pencatatan terhadap hasil pembelian tersebut. Ada dua tahapan pencatatan yang harus dilakukan oleh sekolah, yaitu penerimaan, serta penyimpanan dan penggunaan:

1. Penerimaan

Barang inventaris yang diterima oleh sekolah sebagai hasil pembelian harus dicatat dalam buku penerimaan barang sebagai bukti penerimaan barang. Barang yang diterima atas pembelian harus dicocokkan dengan surat perintah kerja atau surat pemesanan yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah terkait: jenis, jumlah barang, harga barang, dan kondisi fisik barang. Jika sudah sesuai barang dapat diterima dan jika tidak sesuai, maka sebaiknya ditanggguhkan atau tidak diterima. Buku Penerimaan barang dibuat sesuai formulir (Format VII).

2. Penyimpanan dan Penggunaan

Seluruh barang inventaris yang telah dicatat penerimaannya oleh sekolah, pada tahap selanjutnya harus dicatatkan dalam buku inventaris barang. Buku inventaris barang dibuat seperti formulir (Format VIII).

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

A. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan dan penggunaan dana BOS, masing-masing SPKK yang telah menerima dana BOS wajib membuat laporan kepada Dirjen Bimas Kristen, dan ditembuskan kepada Kabid Bimas Kristen/Kabid Pendidikan Kristen/Pembimas Kristen pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi, Kasi/Penyelenggara Kristen pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Hal-hal yang dilaporkan adalah jumlah dana BOS yang telah diterima, penyerapan dan pemanfaatan dana.

B. Pembukuan

Sesuai standar pengelolaan pendidikan dan pertanggungjawaban lembaga dalam pengelolaan dana BOS, sekolah harus menyusun pembukuan secara lengkap. Adapun pembukuan dan dokumen pendukung yang harus disusun oleh sekolah adalah:

1) Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) bagi SPKK Swasta

RKAS—Ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite sekolah, dan Pemegang Kas Sekolah dan perlu dilakukan dalam rincian tiap semester yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci dari sumber dana yang diterima sekolah.

- 2) Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKKL) bagi SPKK Negeri Ditandatangani oleh Direktur Jenderal bagi SPKK Negeri tingkat menengah dan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi bagi SPKK Negeri tingkat dasar.
- 3) Buku Pelaporan
SPKK penerima dana BOS diwajibkan membuat pembukuan baik dengan tulis tangan atau menggunakan komputer, yang terdiri dari Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Bank dan Pajak.
 - a. Buku Kas Umum.
Sesuai dengan rekening Bank yang dimiliki sekolah meliputi semua transaksi eksternal yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga seperti:
 - 1) kolom penerimaan dari penyalur dana BOS, penerimaan dari pemungut pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank;
 - 2) kolom pengeluaran adalah pembelian barang dan jasa biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro dan setoran pajak.
 - b. Buku Pembantu Kas
Buku ini harus mencatat tiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh pemegang kas sekolah dan kepala sekolah.
 - c. Buku Pembantu Bank
Buku ini harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek giro maupun tunai) ditanda tangani pemegang kas sekolah dan kepala sekolah.
 - d. Buku Pembantu Pajak
Buku Pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor dan penyetoran pajak yang harus dipungut selaku wajib pungut pajak.
- 4) Bukti Pengeluaran
 - a. Setiap pengeluaran dicatat dalam buku kas umum;
 - b. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah atau bermaterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - c. Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kwitansi.
- 5) Ketentuan Perpajakan
Ketentuan Pajak terkait penggunaan dana BOS di sekolah harus mengikuti peraturan dan ketentuan pajak nasional sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 56/PMK.03/2016 tentang Tata cara pemberian fasilitas pajak pertambahan nilai tidak dipungut atas penyerahan barang kena pajak tertentu yang bersifat strategis dan tata cara pembayaran pajak pertambahan nilai tidak dipungut yang telah diberikan serta penerapan sanksi dan peraturan serta ketentuan pajak daerah, seperti:
 - a. Pemegang Kas sekolah tidak mempunyai kewajiban memungut PPh pasal 22 karena tidak termasuk sebagai pihak yang ditunjuk sebagai pemungut PPh pasal 22;
 - b. Atas Pembelian buku-buku pelajaran umum, Kitab Suci dan buku-buku pelajaran agama PPh yang terutang dibebaskan;
 - c. Membayar PPh yang dipungut oleh pihak penjual (pengusaha kena pajak) atas pembelian buku-buku pelajaran umum, Kitab Suci dan buku-buku pelajaran agama;
 - d. Kewajiban perpajakan terkait pemberian honor, misalnya pada penerimaan siswa baru, kesiswaan, pengembangan profesi guru, penyusunan laporan BOS adalah:

- (1) Baik PNS maupun Non PNS dipotong PPh pasal 21 dengan menerapkan tarif pasal 17 UU PPh sebesar 5 % dari jumlah bruto kotor;
- (2) Penggunaan bantuan harus memiliki nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna penyetoran wajib pajak.

BAB VII PEMANTAUAN DAN SANKSI

A. Pelaksanaan Pemantauan

1. Pemantauan dilaksanakan oleh Direktorat Pendidikan Kristen melalui Subdit Pendidikan Dasar dan Menengah, dengan tujuan pemantauan, penyaluran dana BOS sesuai jumlah yang telah diterima oleh sekolah dan penggunaan dana BOS sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Juknis ini;
2. Dalam proses pemantauan dana BOS, apabila ditemukan kemungkinan-kemungkinan permasalahan yang dapat menghalangi kelancaran pelayanan penyaluran dan penggunaan dana BOS maka perlu segera diselesaikan;
3. Komponen utama dalam proses pemantauan antara lain :
 - a. Alokasi dana BOS pada sekolah penerima bantuan;
 - b. Penyaluran dan penggunaan dana BOS;
 - c. Pelayanan dan penanganan masalah dalam penggunaan dana BOS;
 - d. Administrasi keuangan dana BOS;
 - e. Pelaporan penggunaan dana BOS.

B. Sanksi

Sanksi terhadap penyalahgunaan wewenang dan penggunaan dana BOS dijatuhkan sanksi sesuai prosedur yang berlaku seperti:

- 1) Sanksi kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pemberhentian, penurunan pangkat, mutasi kerja);
- 2) Ganti rugi, yaitu dana BOS yang terbukti disalahgunakan agar dikembalikan ke pemberi bantuan;
- 3) Penerapan proses hukum, yaitu mulai proses penyidikan, proses peradilan bagi pihak yang diduga atau terbukti melakukan penyimpangan dana BOS;
- 4) Pemblokiran dana dan penghentian sementara/permanen seluruh bantuan pendidikan yang bersumber dari APBN/APBD kepada sekolah bersangkutan.

BAB VIII PENUTUP

Petunjuk Teknis ini menjadi acuan bagi penerima bantuan dana BOS pada SPKK agar dapat dimanfaatkan secara optimal dengan penuh tanggungjawab demi peningkatan kualitas pendidikan.



DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Jeane Marie Tulung
JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
NOMOR 40 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH
PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN

BESARAN BANTUAN DANA BOS SESUAI WILAYAH
(PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

A. SATUAN BIAYA NON DAERAH KHUSUS

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Provinsi Aceh				
	Kabupaten Aceh Barat	Rp 1.010,00	Rp 1.280,00	Rp 1.790,00
	Kabupaten Aceh Barat Daya	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Aceh Besar	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Aceh Jaya	Rp 980,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Aceh Selatan	Rp 980,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Aceh Singkil	Rp 960,00	Rp 1.190,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Aceh Tamiang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Aceh Tengah	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kabupaten Aceh Tenggara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Aceh Timur	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Aceh Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Bener Meriah	Rp 980,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Bireuen	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Gayo Lues	Rp 1.050,00	Rp 1.300,00	Rp 1.780,00
	Kabupaten Nagan Raya	Rp 1.000,00	Rp 1.240,00	Rp 1.700,00
	Kabupaten Pidie	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Pidie Jaya	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Simeulue	Rp 1.060,00	Rp 1.340,00	Rp 1.870,00
	Kota Banda Aceh	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.630,00
	Kota Langsa	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Lhokseumawe	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kota Sabang	Rp 1.020,00	Rp 1.250,00	Rp 1.700,00
	Kota Subulussalam	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
Provinsi Bali				
	Kabupaten Badung	Rp 1.140,00	Rp 1.390,00	Rp 1.890,00
	Kabupaten Bangli	Rp 1.050,00	Rp 1.280,00	Rp 1.750,00
	Kabupaten Buleleng	Rp 1.080,00	Rp 1.320,00	Rp 1.800,00
	Kabupaten Gianyar	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kabupaten Jembrana	Rp 1.140,00	Rp 1.390,00	Rp 1.900,00
	Kabupaten Karang Asem	Rp 1.060,00	Rp 1.300,00	Rp 1.770,00
	Kabupaten Klungkung	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Tabanan	Rp 1.100,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kota Denpasar	Rp 1.060,00	Rp 1.300,00	Rp 1.770,00
Provinsi Banten				
	Kabupaten Lebak	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pandeglang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Serang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tangerang	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kota Cilegon	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kota Serang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Tangerang	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.600,00
	Kota Tangerang Selatan	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kota Tangerang Selatan	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
Provinsi Bengkulu				
	Kabupaten Bengkulu Selatan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Bengkulu Tengah	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Bengkulu Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Kaur	Rp 980,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Kepahiang	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Lebong	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Muko-muko	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Rejang Lebong	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Seluma	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Bengkulu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi D.I. Yogyakarta				
	Kabupaten Bantul	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kabupaten Gunung Kidul	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Kulon Progo	Rp 960,00	Rp 1.190,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Sleman	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.510,00
	Kota Yogyakarta	Rp 940,00	Rp 1.140,00	Rp 1.560,00
Provinsi D.K.I. Jakarta				
	Kabupaten Kepulauan Seribu	Rp 1.130,00	Rp 1.380,00	Rp 1.880,00
	Kota Jakarta Barat	Rp 1.010,00	Rp 1.240,00	Rp 1.680,00
	Kota Jakarta Pusat	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kota Jakarta Selatan	Rp 1.070,00	Rp 1.310,00	Rp 1.790,00
	Kota Jakarta Timur	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.710,00
	Kota Jakarta Utara	Rp 1.080,00	Rp 1.320,00	Rp 1.800,00
Provinsi Gorontalo				
	Kabupaten Boalemo	Rp 960,00	Rp 1.190,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Bone Bolango	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Gorontalo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Pohuwato	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Gorontalo	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Jambi				
	Kabupaten Batang Hari	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Bungo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Kerinci	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Merangin	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Muaro Jambi	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Sarolangun	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp 990,00	Rp 1.240,00	Rp 1.690,00
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp 950,00	Rp 1.190,00	Rp 1.620,00
	Kabupaten Tebo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Jambi	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Sungai Penuh	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Jawa Barat				
	Kabupaten Bandung	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.600,00
	Kabupaten Bandung Barat	Rp 960,00	Rp 1.180,00	Rp 1.600,00
	Kabupaten Bekasi	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Bogor	Rp 1.070,00	Rp 1.300,00	Rp 1.780,00
	Kabupaten Ciamis	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Cianjur	Rp 910,00	Rp 1.120,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Cirebon	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kabupaten Garut	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Indramayu	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Karawang	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Kuningan	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kabupaten Majalengka	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kabupaten Pangandaran	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Purwakarta	Rp 940,00	Rp 1.140,00	Rp 1.560,00
	Kabupaten Subang	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.580,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Sukabumi	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Sumedang	Rp 930,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kabupaten Tasikmalaya	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.510,00
	Kota Bandung	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kota Banjar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Bekasi	Rp 1.020,00	Rp 1.240,00	Rp 1.690,00
	Kota Bogor	Rp 1.100,00	Rp 1.340,00	Rp 1.830,00
	Kota Cimahi	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kota Cirebon	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.560,00
	Kota Depok	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.710,00
	Kota Sukabumi	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.550,00
	Kota Tasikmalaya	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.560,00
Provinsi Jawa Tengah				
	Kabupaten Banjarnegara	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Banyumas	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Batang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Blora	Rp 930,00	Rp 1.130,00	Rp 1.550,00
	Kabupaten Boyolali	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Brebes	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.550,00
	Kabupaten Cilacap	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Demak	Rp 990,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Grobogan	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Jepara	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Karanganyar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Kebumen	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Kendal	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Klaten	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Kudus	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kabupaten Magelang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pati	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Pekalongan	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Pemalang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Purbalingga	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Purworejo	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Rembang	Rp 950,00	Rp 1.170,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Semarang	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.580,00
	Kabupaten Sragen	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Sukoharjo	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tegal	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Temanggung	Rp 910,00	Rp 1.120,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Wonogiri	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Wonosobo	Rp 900,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kota Magelang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Pekalongan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Salatiga	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kota Semarang	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kota Surakarta	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Tegal	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
Provinsi Jawa Timur				
	Kabupaten Bangkalan	Rp 1.010,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kabupaten Banyuwangi	Rp 970,00	Rp 1.180,00	Rp 1.610,00
	Kabupaten Blitar	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Bojonegoro	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Bondowoso	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Gresik	Rp 1.120,00	Rp 1.390,00	Rp 1.900,00
	Kabupaten Jember	Rp 960,00	Rp 1.180,00	Rp 1.600,00
	Kabupaten Jombang	Rp 950,00	Rp 1.180,00	Rp 1.610,00
	Kabupaten Kediri	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Lamongan	Rp 1.030,00	Rp 1.280,00	Rp 1.750,00
	Kabupaten Lumajang	Rp 1.000,00	Rp 1.250,00	Rp 1.700,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Madiun	Rp 970,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Magetan	Rp 1.000,00	Rp 1.240,00	Rp 1.690,00
	Kabupaten Malang	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Mojokerto	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kabupaten Nganjuk	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.550,00
	Kabupaten Ngawi	Rp 980,00	Rp 1.210,00	Rp 1.660,00
	Kabupaten Pacitan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pamekasan	Rp 1.030,00	Rp 1.310,00	Rp 1.830,00
	Kabupaten Pasuruan	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kabupaten Ponorogo	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kabupaten Probolinggo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Sampang	Rp 1.030,00	Rp 1.300,00	Rp 1.810,00
	Kabupaten Sidoarjo	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kabupaten Situbondo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Sumenep	Rp 1.060,00	Rp 1.340,00	Rp 1.880,00
	Kabupaten Trenggalek	Rp 950,00	Rp 1.180,00	Rp 1.620,00
	Kabupaten Tuban	Rp 930,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kabupaten Tulungagung	Rp 900,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kota Batu	Rp 900,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kota Blitar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Kediri	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Madiun	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kota Malang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Mojokerto	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kota Pasuruan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.510,00
	Kota Probolinggo	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Surabaya	Rp 1.020,00	Rp 1.250,00	Rp 1.700,00
Provinsi Kalimantan Barat				
	Kabupaten Bengkayang	Rp 1.070,00	Rp 1.340,00	Rp 1.830,00
	Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 1.160,00	Rp 1.440,00	Rp 1.970,00
	Kabupaten Kayong Utara	Rp 1.080,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kabupaten Ketapang	Rp 1.010,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kabupaten Kuburaya	Rp 1.060,00	Rp 1.320,00	Rp 1.840,00
	Kabupaten Landak	Rp 1.070,00	Rp 1.330,00	Rp 1.820,00
	Kabupaten Melawi	Rp 1.080,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kabupaten Mempawah	Rp 1.000,00	Rp 1.220,00	Rp 1.670,00
	Kabupaten Sambas	Rp 1.010,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kabupaten Sanggau	Rp 1.090,00	Rp 1.350,00	Rp 1.850,00
	Kabupaten Sekadau	Rp 1.040,00	Rp 1.290,00	Rp 1.770,00
	Kabupaten Sintang	Rp 1.080,00	Rp 1.340,00	Rp 1.830,00
	Kota Pontianak	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kota Singkawang	Rp 1.040,00	Rp 1.270,00	Rp 1.730,00
Provinsi Kalimantan Selatan				
	Kabupaten Balangan	Rp 960,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Banjar	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.580,00
	Kabupaten Barito Kuala	Rp 980,00	Rp 1.220,00	Rp 1.660,00
	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp 960,00	Rp 1.190,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Kotabaru	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tabalong	Rp 970,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tanah Laut	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tapin	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Banjarbaru	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kota Banjarmasin	Rp 950,00	Rp 1.170,00	Rp 1.590,00
Provinsi Kalimantan Tengah				
	Kabupaten Barito Selatan	Rp 1.000,00	Rp 1.260,00	Rp 1.760,00
	Kabupaten Barito Timur	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Barito Utara	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.650,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Gunung Mas	Rp 1.010,00	Rp 1.250,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Kapuas	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Katingan	Rp 980,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Lamandau	Rp 1.140,00	Rp 1.450,00	Rp 2.020,00
	Kabupaten Murung Raya	Rp 1.100,00	Rp 1.360,00	Rp 1.860,00
	Kabupaten Pulang Pisau	Rp 990,00	Rp 1.260,00	Rp 1.750,00
	Kabupaten Seruyan	Rp 1.040,00	Rp 1.290,00	Rp 1.770,00
	Kabupaten Sukamara	Rp 1.130,00	Rp 1.400,00	Rp 1.920,00
	Kota Palangka raya	Rp 910,00	Rp 1.120,00	Rp 1.520,00
Provinsi Kalimantan Timur				
	Kabupaten Berau	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.660,00
	Kabupaten Kutai Barat	Rp 1.110,00	Rp 1.380,00	Rp 1.890,00
	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp 1.050,00	Rp 1.280,00	Rp 1.740,00
	Kabupaten Kutai Timur	Rp 1.070,00	Rp 1.310,00	Rp 1.790,00
	Kabupaten Mahakam Ulu	Rp 1.600,00	Rp 2.020,00	Rp 2.820,00
	Kabupaten Paser	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kabupaten Penajam Paser Utara	Rp 980,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kota Balikpapan	Rp 1.000,00	Rp 1.220,00	Rp 1.670,00
	Kota Bontang	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Samarinda	Rp 970,00	Rp 1.190,00	Rp 1.620,00
Provinsi Kalimantan Utara				
	Kabupaten Bulungan	Rp 1.060,00	Rp 1.320,00	Rp 1.800,00
	Kabupaten Malinau	Rp 1.060,00	Rp 1.350,00	Rp 1.880,00
	Kabupaten Nunukan	Rp 1.120,00	Rp 1.370,00	Rp 1.870,00
	Kabupaten Tana Tidung	Rp 1.130,00	Rp 1.400,00	Rp 1.910,00
	Kota Tarakan	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung				
	Kabupaten Bangka	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Bangka Barat	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.550,00
	Kabupaten Bangka Selatan	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Bangka Tengah	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Belitung	Rp 940,00	Rp 1.140,00	Rp 1.560,00
	Kabupaten Belitung Timur	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.590,00
	Kota Pangkalpinang	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
Provinsi Kepulauan Riau				
	Kabupaten Bintan	Rp 1.100,00	Rp 1.340,00	Rp 1.830,00
	Kabupaten Karimun	Rp 1.110,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rp 1.380,00	Rp 1.720,00	Rp 2.350,00
	Kabupaten Lingga	Rp 1.250,00	Rp 1.580,00	Rp 2.200,00
	Kabupaten Natuna	Rp 1.220,00	Rp 1.510,00	Rp 2.070,00
	Kota Batam	Rp 1.120,00	Rp 1.360,00	Rp 1.860,00
	Kota Tanjungpinang	Rp 1.130,00	Rp 1.380,00	Rp 1.890,00
Provinsi Lampung				
	Kabupaten Lampung Barat	Rp 940,00	Rp 1.170,00	Rp 1.600,00
	Kabupaten Lampung Selatan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Lampung Tengah	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Lampung Timur	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Lampung Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Mesuji	Rp 950,00	Rp 1.180,00	Rp 1.620,00
	Kabupaten Pesawaran	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pesisir Barat	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Pringsewu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tanggamus	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tulang Bawang	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Tulang Bawang Barat	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Way Kanan	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Bandar Lampung	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Metro	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Provinsi Maluku				
	Kabupaten Buru	Rp 1.310,00	Rp 1.630,00	Rp 2.230,00
	Kabupaten Buru Selatan	Rp 1.290,00	Rp 1.630,00	Rp 2.280,00
	Kabupaten Kepulauan Aru	Rp 1.260,00	Rp 1.600,00	Rp 2.230,00
	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Rp 1.190,00	Rp 1.480,00	Rp 2.020,00
	Kabupaten Maluku Barat Daya	Rp 1.290,00	Rp 1.640,00	Rp 2.290,00
	Kabupaten Maluku Tengah	Rp 1.060,00	Rp 1.310,00	Rp 1.790,00
	Kabupaten Maluku Tenggara	Rp 1.230,00	Rp 1.550,00	Rp 2.170,00
	Kabupaten Seram Bagian Barat	Rp 1.080,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp 1.090,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kota Ambon	Rp 1.020,00	Rp 1.250,00	Rp 1.700,00
	Kota Tual	Rp 1.190,00	Rp 1.480,00	Rp 2.020,00
Provinsi Maluku Utara				
	Kabupaten Halmahera Barat	Rp 1.160,00	Rp 1.460,00	Rp 2.040,00
	Kabupaten Halmahera Selatan	Rp 1.110,00	Rp 1.400,00	Rp 1.960,00
	Kabupaten Halmahera Tengah	Rp 1.230,00	Rp 1.560,00	Rp 2.180,00
	Kabupaten Halmahera Timur	Rp 1.100,00	Rp 1.370,00	Rp 1.870,00
	Kabupaten halmahera Utara	Rp 1.100,00	Rp 1.390,00	Rp 1.940,00
	Kabupaten Kepulauan Morotai	Rp 1.140,00	Rp 1.450,00	Rp 2.020,00
	Kabupaten Kepulauan Sula	Rp 1.290,00	Rp 1.630,00	Rp 2.270,00
	Kabupaten Pulau Taliabu	Rp 1.280,00	Rp 1.630,00	Rp 2.270,00
	Kota Ternate	Rp 1.080,00	Rp 1.320,00	Rp 1.800,00
	Kota Tidore Kepulauan	Rp 1.120,00	Rp 1.420,00	Rp 1.990,00
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	Kabupaten Bima	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Dompu	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Lombok Barat	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Lombok Tengah	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Lombok Timur	Rp 990,00	Rp 1.240,00	Rp 1.690,00
	Kabupaten Lombok Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Sumbawa	Rp 950,00	Rp 1.180,00	Rp 1.610,00
	Kabupaten Sumbawa Barat	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.530,00
	Kota Bima	Rp 1.010,00	Rp 1.240,00	Rp 1.690,00
	Kota Mataram	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.580,00
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	Kabupaten Alor	Rp 1.060,00	Rp 1.340,00	Rp 1.870,00
	Kabupaten Belu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Ende	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Flores Timur	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kabupaten Kupang	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Lembata	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Malaka	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Manggarai	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kabupaten Manggarai Barat	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Manggarai Timur	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Nagakeo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Ngada	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Rote-Ndao	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Sabu Raijua	Rp 1.110,00	Rp 1.350,00	Rp 1.840,00
	Kabupaten Sikka	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Sumba Barat	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.550,00
	Kabupaten Sumba Barat Daya	Rp 950,00	Rp 1.170,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Sumba Tengah	Rp 910,00	Rp 1.120,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Sumba Timur	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Timor Tengah Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Kupang	Rp 910,00	Rp 1.120,00	Rp 1.520,00
Provinsi Papua				
	Kabupaten Biak Numfor	Rp 1.240,00	Rp 1.540,00	Rp 2.100,00
	Kabupaten Jayapura	Rp 1.120,00	Rp 1.360,00	Rp 1.860,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Keerom	Rp 1.330,00	Rp 1.650,00	Rp 2.260,00
	Kabupaten Kepulauan Yapen	Rp 1.400,00	Rp 1.740,00	Rp 2.370,00
	Kabupaten Memberamo Raya	Rp 1.900,00	Rp 2.400,00	Rp 3.350,00
	Kabupaten Sarmi	Rp 1.360,00	Rp 1.690,00	Rp 2.310,00
	Kabupaten Supiori	Rp 1.350,00	Rp 1.680,00	Rp 2.290,00
	Kabupaten Waropen	Rp 1.680,00	Rp 2.130,00	Rp 2.970,00
	Kota Jayapura	Rp 1.090,00	Rp 1.340,00	Rp 1.820,00
Provinsi Papua Barat				
	Kabupaten Fak-Fak	Rp 1.310,00	Rp 1.600,00	Rp 2.180,00
	Kabupaten Kaimana	Rp 1.150,00	Rp 1.430,00	Rp 1.950,00
	Kabupaten Manokwari	Rp 1.080,00	Rp 1.320,00	Rp 1.800,00
	Kabupaten Manokwari Selatan	Rp 1.370,00	Rp 1.700,00	Rp 2.330,00
	Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp 1.890,00	Rp 2.390,00	Rp 3.340,00
	Kabupaten Teluk Bintuni	Rp 1.460,00	Rp 1.820,00	Rp 2.480,00
	Kabupaten Teluk Wondama	Rp 1.190,00	Rp 1.480,00	Rp 2.020,00
Provinsi Papua Barat Daya				
	Kabupaten Maybrat	Rp 1.610,00	Rp 2.030,00	Rp 2.840,00
	Kabupaten Raja Ampat	Rp 1.290,00	Rp 1.630,00	Rp 2.270,00
	Kabupaten Sorong	Rp 1.220,00	Rp 1.510,00	Rp 2.060,00
	Kabupaten Sorong Selatan	Rp 1.270,00	Rp 1.580,00	Rp 2.160,00
	Kabupaten Tambrauw	Rp 1.390,00	Rp 1.770,00	Rp 2.460,00
	Kota Sorong	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
Provinsi Papua Pegunungan				
	Kabupaten Jaya Wijaya	Rp 1.800,00	Rp 2.200,00	Rp 3.000,00
	Kabupaten Lanny Jaya	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Membramo Tengah	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Nduga	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Pegunungan Bintang	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Tolikara	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Yahukimo	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Yalimo	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
Provinsi Papua Selatan				
	Kabupaten Asmat	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Boven Digoel	Rp 1.520,00	Rp 1.890,00	Rp 2.580,00
	Kabupaten Mappi	Rp 1.370,00	Rp 1.670,00	Rp 2.280,00
	Kabupaten Merauke	Rp 1.380,00	Rp 1.680,00	Rp 2.300,00
Provinsi Papua Tengah				
	Kabupaten Deiyai	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Dogiyai	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Intan Jaya	Rp 1.960,00	Rp 2.480,00	Rp 3.470,00
	Kabupaten Mimika	Rp 1.250,00	Rp 1.550,00	Rp 2.120,00
	Kabupaten Nabire	Rp 1.390,00	Rp 1.720,00	Rp 2.350,00
	Kabupaten Paniai	Rp 1.800,00	Rp 2.200,00	Rp 3.000,00
	Kabupaten Puncak	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
	Kabupaten Puncak Jaya	Rp 1.870,00	Rp 2.330,00	Rp 3.180,00
Provinsi Riau				
	Kabupaten Bengkalis	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Kampar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp 1.040,00	Rp 1.300,00	Rp 1.770,00
	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pelalawan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Rokan Hilir	Rp 950,00	Rp 1.180,00	Rp 1.620,00
	Kabupaten Rokan Hulu	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Siak	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Dumai	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.530,00
	Kota Pekanbaru	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Sulawesi Barat				
	Kabupaten Majene	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Mamasa	Rp 990,00	Rp 1.250,00	Rp 1.750,00
	Kabupaten Mamuju	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Mamuju Tengah	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Pasangkayu	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Polewali Mandar	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
Provinsi Sulawesi Selatan				
	Kabupaten Bantaeng	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Barru	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Bone	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Bulukumba	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Enrekang	Rp 930,00	Rp 1.140,00	Rp 1.550,00
	Kabupaten Gowa	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Jenepono	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp 1.050,00	Rp 1.300,00	Rp 1.780,00
	Kabupaten Luwu	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.690,00
	Kabupaten Luwu Timur	Rp 990,00	Rp 1.260,00	Rp 1.760,00
	Kabupaten Luwu Utara	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Maros	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pinrang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Sidenreng Rappang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Sinjai	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Soppeng	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Takalar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tana Toraja	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kabupaten Toraja Utara	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kabupaten Wajo	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Makassar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Palopo	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Parepare	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.510,00
Provinsi Sulawesi Tengah				
	Kabupaten Banggai	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp 990,00	Rp 1.250,00	Rp 1.740,00
	Kabupaten Banggai Laut	Rp 960,00	Rp 1.200,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Buol	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Donggala	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Morowali	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Morowali Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Parigi Moutong	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Poso	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Sigi	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Tojo Una-Una	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten ToliToli	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Palu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Sulawesi Tenggara				
	Kabupaten Bombana	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Buton	Rp 970,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Buton Selatan	Rp 1.030,00	Rp 1.290,00	Rp 1.760,00
	Kabupaten Buton Tengah	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kabupaten Buton Utara	Rp 1.030,00	Rp 1.280,00	Rp 1.750,00
	Kabupaten Kolaka	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Kolaka Timur	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Kolaka Utara	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Konawe	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Konawe Kepulauan	Rp 1.030,00	Rp 1.300,00	Rp 1.820,00
	Kabupaten Konawe Selatan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Konawe Utara	Rp 1.000,00	Rp 1.260,00	Rp 1.760,00
	Kabupaten Muna	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Muna Barat	Rp 1.010,00	Rp 1.250,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Wakatobi	Rp 1.040,00	Rp 1.320,00	Rp 1.840,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kota Baubau	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kota Kendari	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Sulawesi Utara				
	Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp 960,00	Rp 1.190,00	Rp 1.620,00
	Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan	Rp 970,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kabupaten Bolaang Mongondow Timur	Rp 980,00	Rp 1.220,00	Rp 1.660,00
	Kabupaten Bolaang Mongondow Utara	Rp 990,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Kep. Sangihe	Rp 1.220,00	Rp 1.550,00	Rp 2.160,00
	Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Rp 1.100,00	Rp 1.360,00	Rp 1.870,00
	Kabupaten Kepulauan Talaud	Rp 1.340,00	Rp 1.700,00	Rp 2.370,00
	Kabupaten Minahasa	Rp 1.000,00	Rp 1.270,00	Rp 1.770,00
	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp 1.010,00	Rp 1.260,00	Rp 1.720,00
	Kabupaten Minahasa Tenggara	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Minahasa Utara	Rp 990,00	Rp 1.230,00	Rp 1.680,00
	Kota Bitung	Rp 990,00	Rp 1.210,00	Rp 1.650,00
	Kota Kotamobagu	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.600,00
	Kota Manado	Rp 990,00	Rp 1.240,00	Rp 1.690,00
	Kota Tomohon	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.590,00
Provinsi Sumatera Barat				
	Kabupaten Agam	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Dharmasraya	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp 1.200,00	Rp 1.490,00	Rp 2.040,00
	Kabupaten Lima Puluh Koto	Rp 980,00	Rp 1.240,00	Rp 1.730,00
	Kabupaten Padang Pariaman	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pasaman	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pasaman Barat	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Sijunjung	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Solok	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Solok Selatan	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Tanah Datar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Bukittinggi	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.520,00
	Kota Padang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Padang Panjang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Pariaman	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Payakumbuh	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Sawah Lunto	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kota Solok	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Sumatera Selatan				
	Kabupaten Banyuasin	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Empat Lawang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Lahat	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Muara Enim	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Musi Banyuasin	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Musi Rawas	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Ogan Ilir	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Lubuk Linggau	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Pagar Alam	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Palembang	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Prabumulih	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
Provinsi Sumatera Utara				
	Kabupaten Asahan	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Batubara	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Dairi	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.580,00
	Kabupaten Deli Serdang	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.520,00
	Kabupaten Humbang Hasudutan	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Karo	Rp 920,00	Rp 1.130,00	Rp 1.540,00
	Kabupaten Labuhan Batu	Rp 960,00	Rp 1.170,00	Rp 1.600,00
	Kabupaten Labuhan Batu Selatan	Rp 1.010,00	Rp 1.250,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kabupaten Langkat	Rp 940,00	Rp 1.160,00	Rp 1.590,00
	Kabupaten Mandailing Natal	Rp 900,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kabupaten Nias	Rp 1.030,00	Rp 1.260,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Nias Barat	Rp 1.030,00	Rp 1.280,00	Rp 1.750,00
	Kabupaten Nias Selatan	Rp 1.070,00	Rp 1.330,00	Rp 1.820,00
	Kabupaten Nias Utara	Rp 1.040,00	Rp 1.290,00	Rp 1.760,00
	Kabupaten Padang Lawas	Rp 970,00	Rp 1.200,00	Rp 1.640,00
	Kabupaten Padang Lawas utara	Rp 980,00	Rp 1.210,00	Rp 1.660,00
	Kabupaten Pakpak Bharat	Rp 960,00	Rp 1.200,00	Rp 1.630,00
	Kabupaten Samosir	Rp 960,00	Rp 1.180,00	Rp 1.600,00
	Kabupaten Serdang Bedagai	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Simalungun	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp 940,00	Rp 1.150,00	Rp 1.570,00
	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp 950,00	Rp 1.160,00	Rp 1.580,00
	Kabupaten Toba	Rp 960,00	Rp 1.190,00	Rp 1.630,00
	Kota Binjai	Rp 910,00	Rp 1.110,00	Rp 1.510,00
	Kota Gunungsitoli	Rp 970,00	Rp 1.180,00	Rp 1.610,00
	Kota Medan	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kota Padang Sidempuan	Rp 920,00	Rp 1.120,00	Rp 1.530,00
	Kota Pematangsiantar	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Sibolga	Rp 970,00	Rp 1.190,00	Rp 1.620,00
	Kota Tanjung Balai	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00
	Kota Tebing Tinggi	Rp 900,00	Rp 1.100,00	Rp 1.500,00

B. SATUAN BIAYA DAERAH KHUSUS

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
Provinsi Aceh				
	Kabupaten Aceh Barat	Rp 1.152,00	Rp 1.460,00	
	Kabupaten Aceh Besar	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
	Kabupaten Aceh Jaya	Rp 1.117,00	Rp 1.414,00	
	Kabupaten Aceh Selatan	Rp 1.117,00	Rp 1.414,00	Rp 1.972,00
	Kabupaten Aceh Singkil	Rp 1.095,00	Rp 1.356,00	Rp 1.858,00
	Kabupaten Aceh Tengah	Rp 1.128,00	Rp 1.402,00	Rp 1.915,00
	Kabupaten Aceh Tenggara	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
	Kabupaten Aceh Timur	Rp 1.106,00	Rp 1.368,00	
	Kabupaten Aceh Utara	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
	Kabupaten Bener Meriah	Rp 1.117,00	Rp 1.414,00	
	Kabupaten Bireuen	Rp 1.106,00	Rp 1.368,00	
	Kabupaten Gayo Lues	Rp 1.197,00	Rp 1.482,00	Rp 2.029,00
	Kabupaten Nagan Raya	Rp 1.140,00	Rp 1.414,00	
	Kabupaten Pidie	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
	Kabupaten Pidie Jaya	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
	Kabupaten Simeulue	Rp 1.208,00	Rp 1.528,00	
	Kota Subulussalam	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
Provinsi Banten				
	Kabupaten Lebak	Rp 1.015,00	Rp 1.241,00	Rp 1.692,00
	Kabupaten Pandeglang	Rp 1.015,00	Rp 1.241,00	Rp 1.692,00
Provinsi Bengkulu				
	Kabupaten Bengkulu Tengah	Rp 1.072,00		
	Kabupaten Bengkulu Utara	Rp 1.072,00		
	Kabupaten Kaur	Rp 1.117,00	Rp 1.414,00	
	Kabupaten Kepahiang			
	Kabupaten Lebong	Rp 1.072,00		
	Kabupaten Rejang Lebong	Rp 1.026,00		
	Kabupaten Seluma	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
Provinsi Gorontalo				
	Kabupaten Boalemo	Rp 1.153,00	Rp 1.430,00	Rp 1.958,00
	Kabupaten Bone Bolango			
	Kabupaten Gorontalo	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Gorontalo Utara	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
Provinsi Jambi				
	Kabupaten Batang Hari	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Kerinci	Rp 1.072,00		
	Kabupaten Merangin	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
	Kabupaten Muaro Jambi	Rp 1.026,00		
	Kabupaten Sarolangun	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
	Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Rp 1.128,00	Rp 1.414,00	Rp 1.927,00
	Kabupaten Tanjung Jabung Timur	Rp 1.083,00	Rp 1.356,00	
	Kabupaten Tebo	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
Provinsi Jawa Barat				
	Kabupaten Cianjur	Rp 1.026,00	Rp 1.263,00	Rp 1.714,00
Provinsi Jawa Tengah				
	Kabupaten Demak	Rp 1.116,00		
	Kabupaten Jepara	Rp 1.116,00	Rp 1.365,00	
	Kabupaten Magelang	Rp 1.015,00		
	Kabupaten Tegal	Rp 1.015,00	Rp 1.241,00	
	Kabupaten Wonosobo	Rp 1.015,00	Rp 1.252,00	
Provinsi Jawa Timur				
	Kabupaten Bondowoso	Rp 1.061,00		
	Kabupaten Situbondo	Rp 1.061,00		

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Sumenep	Rp 1.195,00	Rp 1.512,00	Rp 2.120,00
Provinsi Kalimantan Barat				
	Kabupaten Bengkayang	Rp 1.254,00	Rp 1.569,00	Rp 2.144,00
	Kabupaten Kapuas Hulu	Rp 1.359,00	Rp 1.687,00	Rp 2.308,00
	Kabupaten Kayong Utara	Rp 1.265,00	Rp 1.582,00	Rp 2.155,00
	Kabupaten Ketapang	Rp 1.183,00	Rp 1.476,00	Rp 2.015,00
	Kabupaten Kuburaya	Rp 1.242,00	Rp 1.546,00	Rp 2.155,00
	Kabupaten Landak	Rp 1.254,00	Rp 1.558,00	Rp 2.132,00
	Kabupaten Melawi	Rp 1.265,00	Rp 1.582,00	Rp 2.155,00
	Kabupaten Mempawah	Rp 1.171,00	Rp 1.429,00	Rp 1.956,00
	Kabupaten Sambas	Rp 1.183,00	Rp 1.441,00	Rp 1.968,00
	Kabupaten Sanggau	Rp 1.277,00	Rp 1.582,00	Rp 2.167,00
	Kabupaten Sekadau	Rp 1.218,00	Rp 1.511,00	Rp 2.074,00
	Kabupaten Sintang	Rp 1.265,00	Rp 1.569,00	Rp 2.144,00
Provinsi Kalimantan Selatan				
	Kabupaten Balangan	Rp 1.124,00	Rp 1.406,00	Rp 1.921,00
	Kabupaten Banjar	Rp 1.113,00	Rp 1.359,00	
	Kabupaten Barito Kuala	Rp 1.148,00	Rp 1.429,00	
	Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Rp 1.101,00	Rp 1.359,00	
	Kabupaten Hulu Sungai Tengah	Rp 1.101,00		
	Kabupaten Hulu Sungai Utara	Rp 1.124,00	Rp 1.394,00	
	Kabupaten Kotabaru	Rp 1.054,00	Rp 1.288,00	
	Kabupaten Tabalong	Rp 1.137,00	Rp 1.418,00	
	Kabupaten Tanah Bumbu	Rp 1.054,00	Rp 1.288,00	
	Kabupaten Tanah Laut	Rp 1.054,00		
	Kabupaten Tapin	Rp 1.101,00		
Provinsi Kalimantan Tengah				
	Kabupaten Barito Selatan	Rp 1.171,00	Rp 1.476,00	Rp 2.061,00
	Kabupaten Barito Timur	Rp 1.101,00	Rp 1.359,00	
	Kabupaten Barito Utara	Rp 1.137,00	Rp 1.406,00	
	Kabupaten Gunung Mas	Rp 1.183,00	Rp 1.465,00	
	Kabupaten Kapuas	Rp 1.101,00	Rp 1.359,00	
	Kabupaten Katingan	Rp 1.148,00	Rp 1.452,00	Rp 2.027,00
	Kabupaten Kotawaringin Barat	Rp 1.078,00	Rp 1.324,00	
	Kabupaten Kotawaringin Timur	Rp 1.101,00	Rp 1.359,00	
	Kabupaten Lamandau	Rp 1.335,00	Rp 1.699,00	
	Kabupaten Murung Raya	Rp 1.288,00	Rp 1.593,00	Rp 2.179,00
	Kabupaten Pulang Pisau	Rp 1.160,00	Rp 1.476,00	Rp 2.050,00
	Kabupaten Seruyan	Rp 1.218,00	Rp 1.511,00	
	Kabupaten Sukamara	Rp 1.324,00	Rp 1.640,00	
	Kota Palangka Raya	Rp 1.066,00	Rp 1.312,00	
Provinsi Kalimantan Timur				
	Kabupaten Berau	Rp 1.160,00	Rp 1.418,00	
	Kabupaten Kutai Barat	Rp 1.301,00	Rp 1.616,00	Rp 2.214,00
	Kabupaten Kutai Kartanegara	Rp 1.230,00	Rp 1.499,00	Rp 2.038,00
	Kabupaten Kutai Timur	Rp 1.254,00	Rp 1.535,00	Rp 2.097,00
	Kabupaten Mahakam Ulu	Rp 1.874,00	Rp 2.366,00	
	Kabupaten Paser	Rp 1.160,00	Rp 1.441,00	Rp 1.968,00
Provinsi Kalimantan Utara				
	Kabupaten Bulungan	Rp 1.242,00	Rp 1.546,00	
	Kabupaten Malinau	Rp 1.242,00	Rp 1.582,00	Rp 2.202,00
	Kabupaten Nunukan	Rp 1.312,00	Rp 1.605,00	
	Kabupaten Tana Tidung	Rp 1.324,00	Rp 1.640,00	
Provinsi Kepulauan Riau				
	Kabupaten Bintan	Rp 1.254,00	Rp 1.528,00	Rp 2.086,00
	Kabupaten Karimun	Rp 1.265,00	Rp 1.539,00	

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Kepulauan Anambas	Rp 1.573,00	Rp 1.960,00	
	Kabupaten Lingga	Rp 1.425,00	Rp 1.801,00	Rp 2.507,00
	Kabupaten Natuna	Rp 1.391,00		
	Kota Batam	Rp 1.277,00	Rp 1.551,00	
Provinsi Lampung				
	Kabupaten Lampung Barat	Rp 1.072,00	Rp 1.334,00	
	Kabupaten Mesuji	Rp 1.083,00	Rp 1.345,00	
	Kabupaten Pesawaran	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Pesisir Barat	Rp 1.106,00	Rp 1.368,00	Rp 1.869,00
	Kabupaten Tanggamus	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Tulang Bawang	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
	Kabupaten Way Kanan	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
Provinsi Maluku				
	Kabupaten Buru	Rp 1.596,00	Rp 1.986,00	
	Kabupaten Buru Selatan	Rp 1.571,00	Rp 1.986,00	Rp 2.777,00
	Kabupaten Kepulauan Aru	Rp 1.535,00	Rp 1.949,00	Rp 2.716,00
	Kabupaten Kepulauan Tanimbar	Rp 1.450,00	Rp 1.803,00	
	Kabupaten Maluku Barat Daya	Rp 1.571,00	Rp 1.998,00	Rp 2.789,00
	Kabupaten Maluku Tengah	Rp 1.291,00	Rp 1.596,00	Rp 2.180,00
	Kabupaten Maluku Tenggara	Rp 1.498,00	Rp 1.888,00	Rp 2.643,00
	Kabupaten Seram Bagian Barat	Rp 1.316,00	Rp 1.644,00	Rp 2.241,00
	Kabupaten Seram Bagian Timur	Rp 1.328,00	Rp 1.644,00	Rp 2.241,00
	Kota Tual	Rp 1.450,00	Rp 1.803,00	
Provinsi Maluku Utara				
	Kabupaten Halmahera Barat	Rp 1.413,00	Rp 1.778,00	Rp 2.485,00
	Kabupaten Halmahera Selatan	Rp 1.352,00	Rp 1.705,00	Rp 2.387,00
	Kabupaten Halmahera Tengah	Rp 1.498,00	Rp 1.900,00	Rp 2.655,00
	Kabupaten Halmahera Timur	Rp 1.340,00	Rp 1.669,00	Rp 2.278,00
	Kabupaten halmahera Utara	Rp 1.340,00	Rp 1.693,00	Rp 2.363,00
	Kabupaten Kepulauan Morotai	Rp 1.389,00	Rp 1.766,00	Rp 2.461,00
	Kabupaten Kepulauan Sula	Rp 1.571,00	Rp 1.986,00	Rp 2.765,00
	Kabupaten Pulau Taliabu	Rp 1.559,00	Rp 1.986,00	Rp 2.765,00
	Kota Tidore Kepulauan	Rp 1.364,00		
Provinsi Nusa Tenggara Barat				
	Kabupaten Bima	Rp 1.180,00	Rp 1.460,00	Rp 2.008,00
	Kabupaten Sumbawa	Rp 1.156,00	Rp 1.436,00	Rp 1.959,00
Provinsi Nusa Tenggara Timur				
	Kabupaten Alor	Rp 1.290,00	Rp 1.631,00	Rp 2.275,00
	Kabupaten Belu	Rp 1.095,00	Rp 1.338,00	
	Kabupaten Ende	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Flores Timur	Rp 1.119,00	Rp 1.363,00	
	Kabupaten Kupang	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Lembata	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	
	Kabupaten Malaka	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Manggarai	Rp 1.253,00	Rp 1.533,00	
	Kabupaten Manggarai Barat	Rp 1.168,00	Rp 1.424,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Manggarai Timur	Rp 1.180,00	Rp 1.460,00	Rp 1.996,00
	Kabupaten Nagekeo	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	
	Kabupaten Ngada	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Rote-Ndao	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Sabu Raijua	Rp 1.351,00	Rp 1.643,00	Rp 2.239,00
	Kabupaten Sikka	Rp 1.095,00	Rp 1.338,00	
	Kabupaten Sumba Barat	Rp 1.132,00	Rp 1.387,00	
	Kabupaten Sumba Barat Daya	Rp 1.156,00	Rp 1.424,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Sumba Tengah	Rp 1.107,00	Rp 1.363,00	Rp 1.850,00
	Kabupaten Sumba Timur	Rp 1.095,00	Rp 1.338,00	

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Timor Tengah Selatan	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
	Kabupaten Timor Tengah Utara	Rp 1.144,00	Rp 1.411,00	Rp 1.935,00
Provinsi Papua				
	Kabupaten Biak Numfor	Rp 1.581,00	Rp 1.963,00	Rp 2.676,00
	Kabupaten Jayapura	Rp 1.428,00	Rp 1.733,00	Rp 2.371,00
	Kabupaten Keerom	Rp 1.695,00	Rp 2.103,00	Rp 2.880,00
	Kabupaten Kepulauan Yapen	Rp 1.784,00	Rp 2.218,00	Rp 3.021,00
	Kabupaten Memberamo Raya	Rp 2.421,00	Rp 3.058,00	Rp 4.269,00
	Kabupaten Sarmi	Rp 1.733,00	Rp 2.154,00	
	Kabupaten Supiori	Rp 1.720,00	Rp 2.141,00	Rp 2.919,00
	Kabupaten Waropen	Rp 2.141,00	Rp 2.714,00	Rp 3.785,00
Provinsi Papua Barat				
	Kabupaten Fak-Fak	Rp 1.670,00	Rp 2.039,00	Rp 2.778,00
	Kabupaten Kaimana	Rp 1.465,00	Rp 1.822,00	
	Kabupaten Manokwari	Rp 1.376,00	Rp 1.683,00	Rp 2.294,00
	Kabupaten Manokwari Selatan	Rp 1.747,00	Rp 2.166,00	Rp 2.969,00
	Kabupaten Pegunungan Arfak	Rp 2.409,00	Rp 3.046,00	Rp 4.257,00
	Kabupaten Teluk Bintuni	Rp 1.861,00	Rp 2.320,00	Rp 3.161,00
	Kabupaten Teluk Wondama	Rp 1.517,00	Rp 1.886,00	
Provinsi Papua Barat Daya				
	Kabupaten Maybrat	Rp 2.052,00	Rp 2.587,00	Rp 3.620,00
	Kabupaten Raja Ampat	Rp 1.644,00	Rp 2.077,00	Rp 2.893,00
	Kabupaten Sorong	Rp 1.555,00	Rp 1.925,00	Rp 2.625,00
	Kabupaten Sorong Selatan	Rp 1.619,00	Rp 2.014,00	Rp 2.753,00
	Kabupaten Tambrauw	Rp 1.772,00	Rp 2.256,00	Rp 3.135,00
	Kota Sorong	Rp 1.313,00	Rp 1.606,00	
Provinsi Papua Pegunungan				
	Kabupaten Jayawijaya	Rp 2.294,00	Rp 2.804,00	Rp 3.823,00
	Kabupaten Lanny Jaya	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Mamberamo Tengah	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Nduga	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Pegunungan Bintang	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Tolikara	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Yahukimo	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Yalimo	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
Provinsi Papua Selatan				
	Kabupaten Asmat	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Boven Digoel	Rp 1.938,00	Rp 2.409,00	
	Kabupaten Mappi	Rp 1.747,00	Rp 2.129,00	
	Kabupaten Merauke	Rp 1.759,00	Rp 2.141,00	Rp 2.931,00
Provinsi Papua Tengah				
	Kabupaten Deiyai	Rp 2.384,00		
	Kabupaten Dogiyai	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	
	Kabupaten Intan Jaya	Rp 2.498,00	Rp 3.161,00	Rp 4.423,00
	Kabupaten Mimika	Rp 1.593,00	Rp 1.975,00	Rp 2.702,00
	Kabupaten Nabire	Rp 1.772,00	Rp 2.193,00	
	Kabupaten Paniai	Rp 2.294,00	Rp 2.804,00	Rp 3.823,00
	Kabupaten Puncak	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
	Kabupaten Puncak Jaya	Rp 2.384,00	Rp 2.969,00	Rp 4.053,00
Provinsi Riau				
	Kabupaten Bengkalis	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Indragiri Hilir	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
	Kabupaten Indragiri Hulu	Rp 1.026,00		
	Kabupaten Kampar	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Kepulauan Meranti	Rp 1.186,00	Rp 1.482,00	Rp 2.018,00
	Kabupaten Kuantan Singingi	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Pelalawan	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Rokan Hilir	Rp 1.083,00	Rp 1.345,00	Rp 1.847,00
	Kabupaten Rokan Hulu	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
	Kabupaten Siak	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
Provinsi Sulawesi Barat				
	Kabupaten Majene	Rp 1.081,00	Rp 1.322,00	
	Kabupaten Mamasa	Rp 1.190,00	Rp 1.502,00	Rp 2.103,00
	Kabupaten Mamuju	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	Rp 1.910,00
	Kabupaten Mamuju Tengah	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	Rp 1.910,00
	Kabupaten Pasangkayu	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Polewali Mandar	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
Provinsi Sulawesi Selatan				
	Kabupaten Bone	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Enrekang	Rp 1.117,00	Rp 1.370,00	Rp 1.862,00
	Kabupaten Kepulauan Selayar	Rp 1.261,00	Rp 1.562,00	
	Kabupaten Luwu	Rp 1.190,00	Rp 1.478,00	
	Kabupaten Luwu Timur	Rp 1.190,00	Rp 1.514,00	
	Kabupaten Luwu Utara	Rp 1.142,00	Rp 1.393,00	Rp 1.910,00
	Kabupaten Maros	Rp 1.129,00		
	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	Rp 1.081,00	Rp 1.322,00	Rp 1.802,00
	Kabupaten Pinrang	Rp 1.081,00	Rp 1.322,00	
	Kabupaten Sinjai	Rp 1.129,00		
	Kabupaten Tana Toraja	Rp 1.190,00	Rp 1.478,00	Rp 2.018,00
	Kabupaten Toraja Utara	Rp 1.129,00	Rp 1.382,00	
Provinsi Sulawesi Tengah				
	Kabupaten Banggai	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Banggai Kepulauan	Rp 1.190,00	Rp 1.502,00	
	Kabupaten Banggai Laut	Rp 1.153,00	Rp 1.441,00	
	Kabupaten Donggala	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Morowali	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Morowali Utara	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Parigi Moutong	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Poso	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Sigi	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	Rp 1.910,00
	Kabupaten Tojo Una-Una	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Tolitoli	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
Provinsi Sulawesi Tenggara				
	Kabupaten Bombana	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	Rp 1.910,00
	Kabupaten Buton	Rp 1.165,00	Rp 1.454,00	
	Kabupaten Buton Selatan	Rp 1.238,00	Rp 1.550,00	Rp 2.114,00
	Kabupaten Buton Tengah	Rp 1.190,00	Rp 1.478,00	
	Kabupaten Buton Utara	Rp 1.238,00	Rp 1.537,00	Rp 2.103,00
	Kabupaten Kolaka	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Kolaka Timur	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Kolaka Utara	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Konawe	Rp 1.129,00	Rp 1.393,00	
	Kabupaten Konawe Selatan	Rp 1.081,00	Rp 1.322,00	
	Kabupaten Konawe Utara	Rp 1.201,00	Rp 1.514,00	Rp 2.114,00
	Kabupaten Muna	Rp 1.165,00	Rp 1.441,00	Rp 1.982,00
	Kabupaten Muna Barat	Rp 1.213,00	Rp 1.502,00	Rp 2.055,00
Provinsi Sulawesi Utara				
	Kabupaten Bolaang Mongondow	Rp 1.153,00	Rp 1.430,00	
	Kabupaten Kep. Sangihe	Rp 1.466,00	Rp 1.862,00	Rp 2.594,00
	Kabupaten SKepulauan iau Tagulandang Biaro	Rp 1.322,00		
	Kabupaten Kepulauan Talaud	Rp 1.610,00	Rp 2.042,00	
	Kabupaten Minahasa Selatan	Rp 1.213,00		

Provinsi/Kabupaten/Kota		Satuan Biaya BOS/Peserta Didik/Tahun (dalam ribu rupiah)		
		SDTK	SMPTK	SMTK/SMAK
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
	Kabupaten Minahasa Utara	Rp 1.190,00		
Provinsi Sumatera Barat				
	Kabupaten Dharmasraya	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Kepulauan Mentawai	Rp 1.368,00	Rp 1.699,00	Rp 2.325,00
	Kabupaten Pesisir Selatan	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Solok	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
	Kabupaten Solok Selatan	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	Rp 1.812,00
Provinsi Sumatera Selatan				
	Kabupaten Banyuasin	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Lahat	Rp 1.026,00		
	Kabupaten Musi Banyuasin	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Musi Rawas	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Musi Rawas Utara	Rp 1.026,00		
	Kabupaten Ogan Komering Ilir	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Ogan Komering Ulu	Rp 1.026,00		Rp 1.710,00
	Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	Rp 1.710,00
	Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir	Rp 1.026,00		Rp 1.710,00
Provinsi Sumatera Utara				
	Kabupaten Dairi	Rp 1.083,00		
	Kabupaten Humbang Hasudutan	Rp 1.037,00	Rp 1.265,00	
	Kabupaten Labuhan Batu Utara	Rp 1.049,00	Rp 1.277,00	
	Kabupaten Langkat	Rp 1.072,00	Rp 1.323,00	
	Kabupaten Mandailing Natal	Rp 1.026,00	Rp 1.265,00	Rp 1.721,00
	Kabupaten Nias	Rp 1.174,00	Rp 1.436,00	Rp 1.949,00
	Kabupaten Nias Barat	Rp 1.174,00	Rp 1.460,00	Rp 1.995,00
	Kabupaten Nias Selatan	Rp 1.220,00	Rp 1.516,00	Rp 2.075,00
	Kabupaten Nias Utara	Rp 1.186,00	Rp 1.471,00	Rp 2.006,00
	Kabupaten Padang Lawas	Rp 1.106,00	Rp 1.368,00	
	Kabupaten Padang Lawas utara	Rp 1.117,00	Rp 1.380,00	
	Kabupaten Pakpak Bharat	Rp 1.095,00		
	Kabupaten Samosir	Rp 1.095,00		
	Kabupaten Simalungun	Rp 1.026,00		
	Kabupaten Tapanuli Selatan	Rp 1.072,00	Rp 1.311,00	
	Kabupaten Tapanuli Tengah	Rp 1.026,00	Rp 1.254,00	
	Kabupaten Tapanuli Utara	Rp 1.083,00	Rp 1.323,00	Rp 1.801,00
	Kabupaten Toba	Rp 1.095,00	Rp 1.356,00	
	Kota Gunungsitoli	Rp 1.106,00	Rp 1.345,00	



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Nomor :

Tanggal :

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
KEMENTERIAN AGAMA
DENGAN

SEKOLAH

TENTANG
BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN
KEAGAMAAN KRISTEN

Pada hari ini tanggal bulan tahun..... (....-...-.....),
kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. Nama :
NIP :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen
.....
Kementerian Agama RI
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kementerian Agama RI, yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK PERTAMA.

- II. Nama :
Nama Sekolah :
Jabatan :
Alamat Sekolah :
Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Sekolah yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian Kerjasama ini disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa dalam rangka pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sekolah Dasar Teologi Kristen, Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen, Sekolah Menengah Teologi Kristen dan Sekolah Menengah Agama Kristen Tahun....., kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal - pasal tersebut di bawah ini.

Pasal 1
Ketentuan Umum

- (1) Yang dimaksud Surat Perjanjian Kerjasama adalah perjanjian dimana PIHAK PERTAMA mengikat PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Surat Perjanjian ini dengan mengacu pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK tahun
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani berdasarkan kesepakatan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA tanpa ada unsur paksaan;

Pasal 2

Maksud dan Tujuan

- (1). Maksud dibuatnya perjanjian ini adalah untuk mengatur pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK tahun
- (2). Tujuan dibuatnya perjanjian ini adalah agar pelaksanaan penyaluran dan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK tahun dilakukan secara efektif, efisien dan akuntabel.

Pasal 3

Nilai Bantuan Operasional Sekolah

- (1) Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK tahun yang diberikan adalah sebesar Rp (.....).
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan jumlah siswa pada Sekolah tahun yaitu sebesar Rp per siswa.

Pasal 4

Tatacara Penyaluran Dana

- (1) Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahun 2017 dilakukan oleh Pihak Pertama dengan mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada KPPN berdasarkan Surat Keputusan Penetapan penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS), untuk selanjutnya KPPN melaksanakan pencairan dana yang ditujukan langsung ke rekening bank SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK penerima bantuan;

Pasal 5

Hak dan Kewajiban

- (1). PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan bantuan dana sesuai dengan alokasi anggaran yang telah ditetapkan kepada PIHAK KEDUA;
- (2). PIHAK PERTAMA berhak melakukan monitoring dan meminta laporan penggunaan dana bantuan yang telah diterima oleh PIHAK KEDUA;
- (3). PIHAK KEDUA berhak menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK tahun
- (4). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menggunakan bantuan dana yang diberikan PIHAK PERTAMA secara efektif, efisien dan akuntabel;
- (5). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana BOS dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA;
- (5). PIHAK KEDUA Bertanggungjawab atas kerugian negara yang diakibatkan dari kesalahan penggunaan Bantuan dana yang diterima dari PIHAK PERTAMA;
- (6). PIHAK KEDUA bertanggungjawab untuk menyetorkan ke Kas Negara apabila terdapat sisa dana penggunaan bantuan Pemerintah yang diterima dari PIHAK PERTAMA;

- (7). PIHAK KEDUA bersedia diaudit oleh pengawas internal/eksternal pemerintah.

Pasal 6

Penyelesaian Perselisihan

- (1). Apabila terjadi perselisihan, kedua belah pihak bersedia untuk menyelesaikan secara musyawarah, dan apabila tidak tercapai kesepakatan maka akan diselesaikan melalui pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2). Perjanjian kerjasama ini dibuat asli rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, dibubuhi stempel dinas, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada para pihak.

Pasal 7

Penutup

- (1) Jangka waktu pelaksanaan dapat diperpanjang, atas persetujuan PIHAK PERTAMA, didasarkan pada: Surat permohonan perpanjangan dari PIHAK KEDUA dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga) pada lembar pertama dan kedua ditandatangani diatas materai, yang masing-masing mempunyai ketentuan hukum yang sama;
- (3) Hal-hal yang belum tercantum didalam surat perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian.

PARA PIHAK YANG MELAKUKAN KERJASAMA

PIHAK KEDUA,
Kepala Sekolah*)

PIHAK PERTAMA,
Pejabat Pembuat Komitmen

MATERAI

Ttd dan cap

.....

.....
NIP

Mengetahui :
Kuasa Pengguna Anggaran,

.....

*) diisi sesuai nama sekolah SDTK/ SMPTK/ SMTK/ SMAK

FORMULIR PESERTA DIDIK

Tanggal: / /

F-PD

1 IDENTITAS SEKOLAH

a Nama Sekolah :

b NSS : NPSN :

c Alamat Sekolah :

formulir peserta didik

2 IDENTITAS PESERTA DIDIK

a Nama Lengkap :

b Jenis kelamin : 1) Laki-laki 2) Perempuan

c NSN :

d NK :

e Tempat, Tanggal Lahir : , / /

f Agama : 01) Islam 02) Kristen/Protestan 03) Katolik 04) Hindu 05) Budha 06) Khong Hu Chu 09) Lainnya

g Rombel : Tingkat :

h Riwayat Pendidikan :

Tahun	Nama Sekolah	Kelas	status	Status
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1) siswa baru <input type="checkbox"/> 2) pendatang <input type="checkbox"/> 3) anak kelas <input type="checkbox"/> 4) akreditasi <input type="checkbox"/> 5) mengulang <input type="checkbox"/> 6) putus sekolah
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

i Riwayat Boarding :

Jenis	Penyelenggara / Sumber	Tahun Mulai	Tahun Selesai
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Jenis Boarding: 01) Anak berprestasi 02) Anak miskin 03) Pendidikan 04) Unggulan 09) Lainnya

j Catatan Prestasi :

Tahun	Lomba	Juara ke	Tingkat	Jenis
1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 1) Sekolah 2) Kecamatan <input type="checkbox"/> 3) Kab/kota 4) Provinsi	<input type="checkbox"/> 1) Sains 2) Seni <input type="checkbox"/> 3) Olahraga <input type="checkbox"/> 4) Lain-lain
2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 5) Nasional	
3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> 6) Internasional	

k. Identitas Orang Tua/Wali

- Nama Ayah : Tahun Lahir

Pekerjaan : 01) Tidak bekerja 02) Melayan 03) Petani 04) Pelembak 05) PNS/TNI/Polri 06) Karyawan Swasta 07) Pedagang Kecil 08) Pedagang Besar 09) Wiraswasta 10) Wiraswasta 11) Buruh 12) Pensiunan 13) Lainnya

Pendidikan : 01) Tidak Sekolah 02) Patus SD 03) SD Sederajat 04) SMP Sederajat 05) SMA Sederajat 06) D1 07) D2 08) D3 09) D4/S1 10) S2 11) S3

Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,-

- Nama Ibu : Tahun Lahir

Pekerjaan : 1) daftar pilihan sama dengan pekerjaan ayah

Pendidikan : 01) Tidak Sekolah 02) Patus SD 03) SD Sederajat 04) SMP Sederajat 05) SMA Sederajat 06) D1 07) D2 08) D3 09) D4/S1 10) S2 11) S3

Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,-

- Nama Wali : Tahun Lahir

Pekerjaan : 1) daftar pilihan sama dengan pekerjaan ayah

Pendidikan : 01) Tidak Sekolah 02) Patus SD 03) SD Sederajat 04) SMP Sederajat 05) SMA Sederajat 06) D1 07) D2 08) D3 09) D4/S1 10) S2 11) S3

Penghasilan bulanan : 1) Kurang dari Rp1.000.000,- 2) Rp1.000.000-Rp2.000.000,- 3) Lebih dari Rp2.000.000,-

l. Jenis Tinggal : 1) Bersama Orang Tua 2) Wali 3) Kos 4) Asrama 5) Panti Asuhan 6) Lainnya

m. Alamat Tempat Tinggal :

: RT RW

Kelurahan / Desa : Kode Pos

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

n. Tinggi Badan : cm Berat Badan : kg

o. Berteknologi Khusus : 01) Tidak 02) Nelayan 03) Rungtu 04) Grafik Ringan 05) Grafik Sedang 06) Grafik Berat 07) Daksa Ringan 08) Daksa Sedang 09) Daksa Berat 10) Lera 11) Wicara 12) Tuna Ganda 13) Hipertensi 14) Cerdas Istimewa 15) Bakat Istimewa 16) Kesulitan Belajar 17) Marokab 18) Halpa 19) Down Syndrome 20) Asfu 21) Tereptil/Terbalekang 22) Bencana Alam/Sosial 23) Tidak Mampu Ekonomi

p. No Telepon Rumah : - No HP :

q. Jarak tempat tinggal ke sekolah : 1) kurang dari 1 km 2) lebih dari 1 km, sebutkan : km

r. Alat transportasi ke sekolah : 01) Jalan Kaki 02) Kendaraan Pribadi 03) Kendaraan Umum/Angkot/Pete-pete 04) Jemputan Sekolah 05) Kenda Api 06) Cak 07) Andong/Bendi/Sadu/Dokan/Delmas/Sevak 08) Perahu/Persewaan/Taksi/Gesek 09) Lainnya

s. Email pribadi :

Responden, 201...

Yang bertanda tangan Orang Tua/Wali atau Siswa bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.

(.....)

FORMULIR SEKOLAH

KABUPATEN/KOTA : _____

F-SEK

PROVINSI : _____

Tanggal : / /

I IDENTITAS SEKOLAH

a Nama Sekolah

b NSS NPSN

c Jenis Sekolah 01) SD; 02) SMP; 03) SDLE; 04) SMPLE;

d Alamat Sekolah

Desa/Kelurahan Kode Pos

Kecamatan

Kategori Wilayah Daerah Terpencil Daerah Perbatasan Negara Daerah Transmigrasi Bukan Semua

Posisi Geografis , Latitude , Longitude

e No Telpn - No Fax -

f Akses Internet 01) Tidak Ada 02) schoolnet/Jaridiknas 99) Lainnya, sebutkan :

Alamat email

Website http://

g Status Sekolah 1) Negeri 2) Swasta

h Apakah menyelenggarakan pendidikan inklusi ? 1) Ya 2) Tidak

i Status Kepemilikan 1) Pemerintah Pusat 2) Pemerintah Daerah 3) Yayasan 9) Lainnya

SK / Izin Pendirian Sekolah No.

Tanggal / /

SK Izin Operasional No.

Tanggal / /

j Akreditasi 1) A 2) B 3) C 9) Belum Terakreditasi

SK Akreditasi Terakhir No.

Tanggal / /

k Status Mutu 1) Pra SPM 2) SPM 3) Pra SSN 4) SSN 5) RSEI 6) SBI

l Sertifikasi ISO 1) 9001:2000 2) 9001:2008 8) Proses Sertifikasi 9) Belum Bersertifikat

m Waktu Penyelenggaraan 1) Pagi 2) Siang 3) Kombinasi

n Gugus Sekolah 1) Inti 2) Imbas 3) Belum ikut

o Kategori Sekolah 1) SD Biasa 2) SMP Biasa 3) TK-SD satu atap 4) SD-SMP satu atap 5) SMP Terbuka

p Nomor Rekening Bank No.

Nama Bank

Cabang / KCP / Unit

Rekening Atas Nama

q Apakah Sekolah ini telah melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) ? 1) Ya 2) Tidak

r Kurikulum yang di gunakan 1) Kurikulum 1994 2) Kurikulum 2004 3) KTSP 9) Lainnya, sebutkan

* Khusus Sekolah Swasta oleh Yayasan/ Penyelenggara

s Nama Yayasan

Nama Pimpinan Yayasan

Alamat Yayasan

Desa/Kelurahan Kode Pos

Kecamatan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Akte Pendirian No.

Tanggal / /

Kelompok yayasan 01) Aisyiah 05) MPPK 09) YPLP PGRI

02) MPK Muhammadiyah 06) MNPK 99) Lainnya, sebutkan

03) LP Ma'arif 07) Peruari

04) ML Taman Siswa 08) Dharma Perisai

t Sumber Listrik 1) Tidak Ada 2) PLN 3) Diesel 4) Tenaga Surya 5) PLN & Diesel 9) Lainnya

u Daya 1) < 900Watt 2) 900-2200 Watt 3) 2200-4400 Watt 4) > 4400Watt

v Sumber air 1) Air Bawah Tanah 2) Dams/DAM 3) Pompa 4) Sumur 5) Mata air 6) Air hujan 7) Air Baku 8) Lainnya

2 RUANGAN / PRASARANA

No	Kode Ruang (Pemberian Sekolah)	Nama Ruangan	Kode Prasarana	Panjang (meter)	Lebar (meter)	Kondisi (disi sesuai kode pedoman pengisian F-SEK Halaman 2)					Status Kepemilikan
						Atap	Dinding	Kusen	Pondasi	Lantai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1											
2											
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
14											
15											
16											
17											
18											
19											
20											
21											
22											
23											
24											
25											
26											
27											
28											
29											
30											
31											
32											
33											
34											
35											

36											
37											
38											
39											
40											

Kolom (3) Nama Rombongan, (4) Kode Pelembagaan, (7), (8), (9), (10), (11) Rendah mohon lihat panduan

3. KOMBONGAN BELAJAR

No	tingkat	Nama Rombel	Ruang Kelas	NUPTK Wali Kelas	Nama Wali Kelas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

Kolom (4) Ruang Kelas diisi sesuai Kode Ruang pada table diatas, lihat panduan untuk lebih jelasnya

4. SARANA

No	Kode Sarana	Jumlah	Letak	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				

30				
31				
32				
33				
34				
35				
36				
37				
38				
39				
40				
41				
42				
43				
44				

Kolom (2) diisi sesuai kode pengujuk pada panduan, Kolom (4) Ruang Kosong diisi sesuai Kode Ruang pada instruksi diatas, Isiat panduan untuk lebih jelasnya

5 BANTUAN / BLOCK GRANT / SUBSIDI DAN BEASISWA

No	Tahun	Jenis Bantuan	Sumber Bantuan	Besar Bantuan	Dana Pendamping	Peruntukan Dana
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Isilah dengan huruf kapital dan mudah dibaca

Perhatian : Lembar ini harus diisi oleh Kepala Sekolah atau yang mewakili.

Yang bertanda tangan dibawah ini bertanggung jawab secara hukum terhadap kebenaran data yang tercantum.

.....201...
Kepala Sekolah / Atas nama Kepala Sekolah

* Dibubuhi cap/ stempel sekolah

(.....)

KOP SURAT SEKOLAH

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Alamat :
.....

Menyatakan sebagai berikut :

1. Akan menjalankan Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun pada SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK dengan transparan, jujur, objektif dan akuntabel;
2. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
3. Melaksanakan tugas sesuai dengan Petunjuk Teknis dan aturan-aturan lain terkait dengan program yang dimaksud;
4. Bila Saya melanggar hal-hal tersebut di atas, Saya siap menghadapi konsekuensinya.

.....,

Kepala Sekolah

.....

Ttd, cap sekolah, materai

(.....)

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama :
- 2 Jabatan :
- 3 Alamat :
-

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK Tahun

Apabila di kemudian hari, penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tersebut mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian Negara di maksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bukti-bukti pengeluaran terkait penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDTK/SMPTK/SMTK/SMAK Tahun, disimpan sesuai dengan ketentuan sebagai kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Demikian surat pernyataan ini kami dibuat dengan sesungguhnya.

.....
Kepala Sekolah
.....,

Ttd, cap sekolah, Meterai

(.....)

KOP SURAT SEKOLAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

1. Nama Sekolah Penerima :
2. Alamat Sekolah :
3. Nama Bantuan :Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SDTK/
SMPTK/SMTK/SMAK Tahun

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Sekolah
.....
Sebagai Lembaga penerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun
menyatakan bahwa saya:

1. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima;
2. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan;
3. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

.....,

Kepala SMTK/SMAK,

Ttd, cap sekolah, Meterai

(.....)

Lampiran

RENCANA PENGGUNAAN DANA BOS PERIODE s/d
Jumlah Peserta Didik : Peserta didik
Jumlah Dana BOS : Rp.

Rencana Penggunaan Dana BOS di Sekolah

No	Komponen	Jumlah Dana (Rp)
1		Rp
2		Rp
3		Rp
4		Rp
5		Rp
6		Rp
7		Rp
8		Rp
9		Rp
10		Rp
11		Rp
12		Rp
13		Rp
14		Rp
15		Rp
16		Rp
17		Rp
18		Rp
19		Rp
20		Rp
21		Rp
22		Rp
23		Rp
Total		Rp

Komite Sekolah

Kepala Sekolah

Bendahara

.....

.....

.....

BUKU PEMBANTU KAS

Bulan :

Nama Sekolah :
Desa/Kecamatan :
Kabupaten :
Provinsi :

Formulir BOS-K4
Disisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah

No.	Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Kepala Sekolah.....

..... 20.....

Bendahara

.....
NIP

.....
NIP

BUKU KAS UMUM

Bulan :

Nama Sekolah :
 Desa/Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Formulir BOS-K3
Disi oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

....., 20 ...

Mengetahui
Kepala Sekolah

Dibuat oleh,
Bendahara

.....
NIP

.....
NIP

REKAPITULASI NAMA DAN NOMOR REKENING SEKOLAH PENERIMA DANA BOS

Kabupaten/Kota :
 Provinsi :

Lampiran
Dibuat oleh Tim Manajemen BOS Kab/Kota Dikirim Tim Manajemen BOS Provinsi

No	NSS	Nama Sekolah	Bank Cabang	Nama Rekening (Nama Lembaga tdk boleh Rekening Pribadi)	Nomor Rekening	Penandatanganan (2 orang)

Manajer BOS
Kab/Kota

NIP.....

BUKU PEMBANTU BANK

Bulan :

Nama Sekolah :
 Desa/Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Formulir BOS-K5
Diisi oleh Bendahara/Guru
Disimpan di Sekolah

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)	Pengeluaran (Kredit)	Saldo
1	2	3	4	5	6	7

Mengetahui
Kepala Sekolah

....., 20....
Bendahara/Guru

.....
NIP.

.....
NIP.

Format XIV

BUKU PEMBANTU PAJAK

Bulan :

Nama Sekolah :
 Desa/Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi :

Formulir BOS-K6
Diisi oleh Bendahara
Disimpan di Sekolah

Tanggal	No. Kode	No. Bukti	Uraian	Penerimaan (Debit)				Pengeluaran (Kredit)	Saldo
				PPN	PPh 21	PPh 22	PPh 23		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11

Mengetahui
Kepala Sekolah

..... 20

Dibuat oleh,
Bendahara Sekolah

.....
NIP

.....
NIP